

**PENDIDIKAN INKLUSI  
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**(Evaluasi Program di Labschool Rumah Citta Yogyakarta Tahun 2015)**



**NURUL KUSUMA DEWI  
7516130385**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Magister**

**PROGRAM PASCASRJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2015**

**PENDIDIKAN INKLUSI  
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(Evaluasi Program di Labschool Rumah Citta Yogyakarta, Tahun 2015)**

**Inclusive Education to Early Childhood Education  
(Evaluation Programe in Labschool Rumah Citta of Yogyakarta, 2015)**

**Nurul Kusuma Dewi**

Post graduate, State University of Jakarta  
Kusuma\_d3wi3@yahoo.com

**Abstract:** This study aims to evaluate the implementation of inclusive education program in early childhood education in Labschool Rumah Citta Yogyakarta in 2015. This study uses a type of program evaluation research with quantitative and qualitative approaches. Collecting data using observation, interviews, documentation, and assessment questionnaires. Analysis of qualitative data using an interactive model, while quantitative data using quantitative descriptive. Results of the study include: (1) the percentage of achievement of the basic institutions was 90.9% and 98.2% of learners that is the vision, mission, and the administration is in conformity with the principle of inclusive education but Labschool Rumah Citta not have operating licenses; (2) the percentage of human resources was 53.3%, ie educators consists of high school until S2 educational qualifications from various departments, but Labschool Rumah Citta has no special education teachers and experts; (3) provision of facilities and infrastructure reached 67.9%, ie building, room, media and APE, and furniture, but the facilities and infrastructure in Labschool Rumah Citta yet accessibility; (4) the implementation of financial management reached 92.9% including planning, execution, accounting, reporting, and monitoring; (5) the percentage of the assessment input is 100% and 75% follow-up is done at the beginning of the child entry, while the follow-up given to children and the elderly; (6) achievement 81.2% of learning include planning, implementation of 100%, the assessment of 85%, 96.4%, and the role of the teacher is teaching is done by applying the values of inclusiveness and early childhood education; (7) the percentage of parent involvement was 90.9%, namely role of elderly parents are actively involved in implementing inclusive education program, so parents benefit in assisting the child; and (8) the benefits received by children and alumni reached 100%, that children have the social skills and the opportunity to interact.

**Keywords: Education, Inclusion, Childhood**

## RINGKASAN

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi menjadi salah satu program pemerintah dalam mewujudkan pendidikan nasional. Implementasi pendidikan inklusi dijabarkan melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan kesempatan atau peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Pendidikan inklusi pada anak usia dini menekankan pada perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus baik fisik, mental, sosial, agama, budaya, dan sebagainya dapat dioptimalkan sedini mungkin. Pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini dapat mengajarkan keberagaman, menanamkan nilai untuk menghargai perbedaan dan menyiapkan anak baik ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) maupun anak normal untuk dapat beradaptasi dan bersaing di lingkungan masyarakat.

Studi pendahuluan di *Labcschool Rumah Citta* menemukan berbagai program kegiatan yang menghargai inklusifitas, antara lain: (1) menerima anak usia 2-7 tahun dari berbagai latar belakang termasuk ABK dalam satu kelas; (2) menyiapkan *shadow teacher* bagi ABK yang membutuhkan; (3) mendesain perabot maupun fasilitas yang digunakan anak sesuai dengan tinggi anak; (4) menggunakan pakaian bebas; (5) menggunakan media dari bahan limbah anorganik; (6) menyusun kurikulum sendiri dengan mengembangkan kurikulum standar pemerintah. Fakta di atas menarik peneliti untuk melakukan penelitian evaluasi program pendidikan inklusi di *Labcschool Rumah Citta* yang menjadi salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang telah menerapkan pendidikan inklusi. Selain itu, kebutuhan lembaga untuk mengevaluasi program pendidikan inklusi yang telah dilaksanakan selama 11 tahun, sehingga lembaga mengetahui sampai

dimana pencapaian program sesuai dengan tujuan dan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari program yang telah dilaksanakan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian evaluasi program dilakukan di Labschool Rumah Citta Yogyakarta pada tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi model countenanc dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, pengamatan, dan angket penilaian. Teknik analisis kualitatif menggunakan model interaktif yaitu mereduksi data, mendisplay, dan menverifikasi data. Sedangkan untuk data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase dan diagram batang. Keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, realibitas non distrit.

## **3. HASIL PENELITIAN**

Dasar Lembaga Labschool Rumah Citta meliputi visi, misi, tujuan, status lembaga, dan administrasi peserta didik. Persentase keterlaksanaan dasar lembaga adalah 90,9% dan administrasi peserta didik 98,2%. Labschool Rumah memiliki visi, misi, dan tujuan yang disusun Labschool Rumah Citta memiliki ijin pendirian pada tahun 2004, tapi sampai sekarang status lembaga belum mempunyai ijin operasional. Sumber daya manusia di Labschool Rumah Citta dalam melaksanakan program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini belum sesuai dengan standar kriteria evaluasi. Pencapaian sumber daya manusia baru mencapai 53,3%. Angka tersebut menjelaskan bahwa sumber daya manusia di Labschool Rumah Citta belum memnuhi standart kriteria evaluasi. Labschool Rumah Citta belum mempunyai guru pendidikan khusus.

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di Labschool Rumah Citta dalam melaksanakan pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini

adalah 67,9%. Nilai ini menunjukkan bahwa pencapaian sarana dan prasarana terkendala dalam bentuk gedung, menggunakan tangga berundak, bentuk dan luas ruang kelas berbeda-beda. Data kuantitatif menunjukkan pencapaian pengelolaan keuangan adalah 92,9%. Angka tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan di Labschool Rumah Citta dalam melaksanakan program pendidikan inklusi sudah sesuai dengan kriteria. Pengelolaan keuangan di Labschool Rumah Citta, meliputi: perencanaan, pembelajaran, pembukuan, pelaporan, dan pengawasan. Ketercapaian pelaksanaan kurikulum adalah 91,7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan oleh Labschool Rumah Citta adalah kurikulum integrasi. Persentase pelaksanaan asesmen input adalah 100% dan tindak lanjut sebesar 75%. Asesmen input dilakukan oleh Labschool Rumah Citta pada awal penerimaan peserta didik baru.

Persentase pelaksanaan perencanaan program yang dilakukan oleh Labschool Rumah Citta adalah 81,2%. Perencanaan meliputi: membuat rencana pembelajaran, mensetting area, menyiapkan alat dan bahan, serta sumber belajar. Persentase ketercapaian pelaksanaan pembelajaran di Labschool Rumah Citta dalam melaksanakan program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini adalah 100%. Hal ini disebabkan guru mempunyai skil yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga persentase peran guru mencapai 96,4%. Ketercapaian kegiatan penilaian yang dilakukan Labschool Rumah Citta adalah 85%.

Persentase ketercapaian peran serta orang tua Labschool Rumah Citta dalam melaksanakan pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini adalah 90,9%. Persentase ketercapaian manfaat program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini adalah 100%. Anak-anak Labschool Rumah Citta mempunyai keterampilan sosial dan kepercayaan diri yang sangat tinggi, mengerti dan menghargai keberagaman.



## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Kusuma Dewi

NIM : 7516130385

Prodi : S2 PAUD

Judul Tesis : Pendidikan Inklusi Pada Pendidikan Anak Usia Dini  
(Evaluasi Program di Labschool Rumah Citta  
Yogyakarta, Tahun 2015)

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau bagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2015  
Yang menyatakan,

Nurul Kusuma Dewi

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, wr.wb*

Tidak ada kata yang paling mulia selain ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis berjudul “**Penidikan Inklusi Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Evaluasi Program di Labschool Rumah Citta Yogyakarta Tahun 2015)**” dengan baik dan lancar. Tanpa bantuan dari berbagai pihak tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Moch Asmawi, M. Pd, Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta,
2. Prof. Dr. dr. Myrnawati Crie Handini, MS., Pkk, Ketua program studi Pendidikan Anak Usia Dini, program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan tesis ini,
3. Dr. Elindra Yetti, M. Pd, sekretaris program studi Pendidikan Anak Usia Dini Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang dengan sabar telah memberikan kemudahan dan pengarahan dalam proses penyusunan tesis,
4. Dr. Hapidin, M. Pd dan Dr. Nurjannah, M. Pd, sebagai dosen pembimbing tesis yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyusun tesis, telah berkenan meluangkan waktu, selalu memberikan saran, arahan, dan motivasi pada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan tesis.



5. Kepala sekolah dan seluruh staf Labschool Rumah Citta yang telah memberikan kemudahan dan ikut membantu dalam kegiatan penelitian.
6. Teman-teman mahasiswa PAUD dan teman-teman kos atas semangat dan motivasinya.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

*Wassalamu'alaikum, wr.wb*

Jakarta, 12 Agustus 2015

Penulis

## Daftar Isi

	Hal
Halaman Judul .....	I
Abstrak .....	li
Ringkasan .....	lii
Lembar Persetujuan .....	Vi
Bukti Pengesahan Perbaikan .....	Vii
Surat Pernyataan .....	Viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar .....	xiv
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II Kajian Teoritik</b>	
A. Konsep Evaluasi Program .....	13
B. Konsep Pendidikan Inklusi .....	15
1. Kebijakan Pendidikan Inklusi .....	15
2. Hakikat Pendidikan Inklusi .....	16
3. Implementasi Pendidikan Inklusi .....	24
C. Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi .....	33
1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus .....	33
2. Jenis Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi ...	36
a. Anak Berkebutuhan Khusus Permanen .....	36

b. Anak Berkebutuhan Khusus Temporer .....	48
D. Komponen Program Pendidikan Inklusi .....	52
1. Manajemen Pendidikan Inklusi .....	52
a. Sumber Daya Manusia .....	54
b. Sarana dan Prasarana .....	60
c. Pengelolaan Keuangan .....	64
2. Kurikulum Pendidikan Inklusi .....	67
3. Asesmen dan <i>Intervensi</i> .....	76
4. Pembelajaran .....	81
E. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini .....	92
1. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini .....	92
2. Karakteristik Program Pendidikan Anak Usia Dini .....	95
3. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini .....	97
F. Model Evaluasi Program .....	100
G. Hasil Penelitian Relevan .....	103
H. Kriteria Evaluasi .....	106
<b>BAB III Metodologi Penelitian</b>	
A. Tujuan Penelitian .....	111
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	111
C. Subjek Penelitian .....	112
D. Pendekatan, Metode dan Desain Penelitian .....	113
E. Instrumen Penelitian .....	118
1. Kisi-Kisi Instrumen .....	118
2. Validasi .....	120
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	121
G. Teknik Analisis Data .....	126
1. Analisis Data Kualitatif .....	126
2. Analisis Data Kuantitatif .....	129

H. Uji Keabsahan Data .....	129
<b>BAB IV Hasil dan Pembahasan</b>	
A. Deskripsi Umum Lembaga .....	133
B. Data Kuantitatif .....	136
C. Data Kualitatif .....	142
1. Komponen Konteks .....	142
a. Dasar Lembaga .....	142
b. Sumber Daya Manusia .....	150
c. Saran dan Prasarana .....	156
d. Pengelolaan Keuangan .....	167
e. Kurikulum .....	174
2. Komponen Proses .....	178
a. Asesmen Input dan Tindak Lanjut .....	178
b. Pembelajaran .....	184
3. Komponen Out Come .....	200
a. Peran Orang Tua .....	201
b. Anak dan Alumni .....	210
D. Pembahasan .....	220
1. Pembahasan hasil evaluasi .....	242
2. Pembahasan Multidisiplin .....	261
<b>BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	
A. Kesimpulan .....	282
B. Rekomendasi .....	292
Daftar Pustaka .....	295
Riwayat Hidup .....	534

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2. 1 Kriteria Standart Evaluasi Komponen Konteks .....	106
Tabel 2. 2 Kriteria Standart Evaluasi Komponen Proses .....	108
Tabel 2. 3 Kriteria Standart Evaluasi Komponen outcome .....	110
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian .....	112
Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	118
Tabel 3. 3 Teknik Pengumpulan Data .....	118
Tabel 3. 4 Daftar Pengkodean Data .....	125
Tabel 4. 1 Hasil Penilaian Aspek Komponen Program .....	128
Tabel 4. 2 Hasil Evaluasi Komponen Kontek .....	265
Tabel 4. 3 Hasil Evaluasi Komponen Proses .....	274
Tabel 4. 4 Hasil Evaluasi Komponen Out Come .....	274

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Desain Penelitian Evaluasi Program Pendidikan Inklusi ...	116
Gambar 3. 2 Model Interaktif .....	127
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Labschool Rumah Citta .....	134
Gambar 4. 2 Diagram Penilaian Aspek Komponen Program .....	135
Gambar 4. 3 Display Data Dasar Lembaga .....	146
Gambar 4. 4 Display Data Sumber Daya Manusia .....	146
Gambar 4. 5 Display Data Sarana dan Prasarana .....	155
Gambar 4. 6 Display Data Pengelolaan Keuangan .....	171
Gambar 4. 7 Display Data Kurikulum .....	176
Gambar 4. 8 Display Data Asesmen Input dan Tindak Lanjut .....	182
Gambar 4. 9 Display Data Perencanaan Pembelajaran .....	187
Gambar 4. 10 Display Data Pelaksanaan Pembelajaran .....	194
Gambar 4. 11 Display Data Penilaian Pembelajaran .....	199
Gambar 4. 12 Display Data Peran Oranng Tua .....	208
Gambar 4. 13 Display Data Anak dan Alumni .....	217
Gambar 4. 14 Bagan Pembahasan Multidisiplin .....	267

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Catatan Wawancara Pra Penelitian .....	301
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	302
Lampiran 3 Pedoman Observasi .....	308
Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi .....	311
Lampiran 5 Instrumen Evaluasi .....	312
Lampiran 6 Hasil Penilaian Evaluasi .....	328
Lampiran 7 Catatan Lapangan .....	369
Lampiran 7 Catatan Wawancara .....	436
Lampiran 8 Catatan Dokumentasi .....	461
Lampiran 9 Surat Validitas Pakar .....	531
Lampiran 10 Surat Keterangan Penelitian .....	533

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan sangat dibutuhkan manusia dari dalam kandungan sampai dewasa. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dan tidak tergantung dengan bantuan orang lain. Amarta Sen menyebutkan bahwa “tolak ukur keberhasilan pendidikan adalah seberapa jauh usaha pendidikan itu dapat memberikan ruang dan fasilitas yang lebih luas bagi pengembangan kepribadian dan kebebasan bermasyarakat”.<sup>1</sup> Pendidikan juga merupakan suatu proses sadar untuk mengembangkan potensi individu sehingga memiliki kecerdasan pikir dan emosi, berwatak mulia dan mempunyai keterampilan untuk siap hidup ditengah-tengah masyarakat.

Salah satu isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

---

<sup>1</sup> Amarta Sen dalam Sudirman Tamin, (2009). “*Pendekatan Student Center dalam Pembelajaran*”, <http://www.fai.umj.ac.id/> (diakses 20 Maret 2012).



Tujuan negara akan tercapai salah satunya melalui sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dalam pendidikan.<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan penuh kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Secara Umum sistem pendidikan nasional diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 4 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.<sup>3</sup> Pendidikan juga diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan bermakna. Oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat pendidikan yang bermutu.

Pendidikan inklusi menjadi salah satu program pemerintah dalam mewujudkan pendidikan nasional. Implementasi pendidikan inklusi dijabarkan melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan

---

<sup>2</sup> Agustyawati dan Solicha, *Psikologi Pendidikan Anak berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 2-3.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

memberikan kesempatan atau peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMA atau SMK).<sup>4</sup> Pendidikan inklusi tidak hanya sekedar menempatkan peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus baik secara fisik, mental, emosional, sosial budaya dan ekonomi ke dalam sekolah, kelas reguler maupun lingkungan belajar siswa normal tetapi lebih bagaimana memfasilitasi anak untuk berkembang, cara guru dan teman yang normal menyambut siswa yang memiliki kebutuhan khusus dengan baik dan siswa dapat mengenali nilai-nilai keberagaman sehingga akan membentuk pribadi dan watak yang berakhlak mulia. Pendidikan inklusi juga dapat menjadi salah satu cara dalam melaksanakan pendidikan karakter di negara ini.

Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan inklusi sudah banyak diterapkan pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusi dicapai dengan bantuan pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah daerah dan masyarakat yang membantu mengakomodasi implementasi pendidikan inklusi. Pemerintah dan masyarakat semakin sadar akan demokrasi dan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk mencetak generasi bangsa tanpa adanya diskriminasi. Data statistik tahun 2011-2012 tercatat 116.000 anak berkebutuhan khusus dan baru sekitar 11.000 anak berkebutuhan

---

<sup>4</sup> Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009

husus yang terlayani.<sup>5</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa masih sekitar 115.00 anak berkebutuhan khusus yang belum terlayani terutama dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2008 jumlah sekolah inklusi dari jenjang SD (Sekolah Dasar) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) hanya 254 sekolah. Pada tahun 2010 partisipasi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) untuk jenjang pendidikan dasar baru mencapai 30%. Setiap jenjang pendidikan mempunyai peran serta yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Selain melalui sekolah luar biasa, sekolah-sekolah reguler dapat juga memberikan pelayanan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi pada anak usia dini menekankan pada perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus baik fisik, mental, sosial, agama, budaya, dan sebagainya dapat dioptimalkan sedini mungkin. Salah satu tujuan pendidikan anak usia dini (PAUD) secara umum adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar, mengarungi kehidupan dimasa dewasa serta membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini dapat mengajarkan keberagaman, menanamkan nilai untuk

---

<sup>5</sup>Anom, "Adaptasi Kurikulum 2013 untuk Anak Berkebutuhan Khusus", [www.kemendiknas.go.id](http://www.kemendiknas.go.id) (diakses, 5 Oktober 2014).

menghargai perbedaan dan menyiapkan anak baik ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) maupun anak normal untuk dapat beradaptasi dan bersaing di lingkungan masyarakat. Pendidikan anak usia dini yang menerapkan konsep pendidikan inklusi masih jarang. Sebagian besar memandang bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus hanyalah anak yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda secara fisik maupun mental. Masyarakat masih banyak yang belum menyadari bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus adalah setiap anak yang membutuhkan layanan khusus baik berupa tumbuh kembang, status sosial ekonomi, agama, budaya dan adat istiadat, bahasa, dsb. sehingga anak dapat berkembang secara optimal serta mempunyai keterampilan hidup.

Pendidikan inklusi telah digalakkan di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari jenjang PAUD sampai SMA. Hal ini dibuktikan bahwa pada tanggal 2 september 2012 kota Yogyakarta meraih "*Inclusive Education Award*" dari pemerintah pusat karena pemerintah kota Yogyakarta mempunyai komitmen yang tinggi mengenai pendidikan yang ramah, non diskriminasi dan menjunjung multikultur.<sup>6</sup> Menurut Arif Haryono (Kepala Disdikpora Sleman) mengatakan bahwa "anak-anak difabel memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, tidak semua sekolah kontinu menjadi penyelenggara pendidikan inklusi. Yang jelas dalam Penerimaan Peserta

---

<sup>6</sup> Nunuk, "*Inclusive Education Award untuk Kota Yogyakarta*", <http://pendidikan.jogjakota.go.id> (diakses 5 Oktober 2014).

Didik Baru (PPDB), kita tidak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus, imbuhnya. Pendidikan inklusi yang diterapkan pada Pendidikan Anak Usia Dini di daerah Yogyakarta antara lain di PAUD Ahsanu Amalah, Fast Strek, taman indria, Sekolah Labcshool Rumah Citta, dsb.

Sekolah Labcshool Rumah Citta merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang melayani program pendidikan anak usia dini mulai dari usia 2-7 tahun. *Sekolah Labcshool Rumah Citta* berdiri sejak tahun 2003 di bawah naungan LMM ECCD-RC (*Early Childhood care and Development Resource Center*). Sekolah Labcshool Rumah Citta menekankan pada pendidikan nilai-nilai inklusifitas, keberagaman, kearifan lokal, sosialisasi adil gender, ramah lingkungan, dan penghargaan terhadap hak-hak anak. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala Sekolah Labcshool Rumah Citta.

“Sekolah Labcshool Rumah Citta berdiri setahun setelah LMM ECCD-RC (*Early Childhood Care and Development-Resource Center*) berdiri, karena kami bergerak dalam bidang anak dan perempuan serta melihat PAUD yang tidak sesuai perkembangan anak dan kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan hak-hak anak maka pada tahun 2003 kami mendirikan Sekolah Labcshool Rumah Citta dengan berlandaskan pada keinginan kami mendirikan lembaga pendidikan untuk anak, mewujudkan hak-hak anak (pendidikan ramah anak), beorientasi pada kepentingan anak, dan melestarikan budaya yang ada”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Catatan Wawancara Pra Penelitian.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di *Sekolah Labschool Rumah Citta* menemukan berbagai program kegiatan yang menghargai inklusifitas. Labschool Rumah Citta berdiri sejak tahun 2003 yang didirikan oleh Plan dengan bekerjasama dengan LSPPA sehingga program pendidikan inklusi sudah terlaksana selama 11 tahun. Program pendidikan inklusi di Labschool Rumah Citta dilaksanakan dengan menerima anak usia 2-7 tahun dari berbagai latar belakang termasuk ABK dan melakukan pembelajaran bersama antara ABK dan anak biasa di dalam satu kelas. Labschool Rumah Citta menyiapkan *shadow teacher* bagi ABK yang membutuhkan, tetapi tidak setiap ABK menggunakan *shadow teacher* tergantung pada kebutuhan anak. selain itu, Labschool Rumah Citta mendesain perabot maupun fasilitas yang digunakan anak sesuai dengan tinggi anak. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan setiap hari senin sampai jum'at dan tidak menggunakan seragam. Pakaian yang digunakan oleh anak dan guru menggunakan pakaian bebas tapi sopan dan tidak berlebihan atau memakai pakaian yang bagus.

Labschool Rumah Citta menggunakan media dari bahan limbah anorganik sebagai bentuk gerakan nyata ramah lingkungan. Program pendidikan inklusi di Labschool Rumah Citta juga dilaksanakan secara berbeda, karena kurikulum yang digunakan oleh sekolah disusun sendiri pada tahun ajaran baru dengan mengembangkan kurikulum dari pemerintah. Bentuk gedung atau bangunan di Labschool Rumah Citta belum aksesibilitas

bagi semua jenis ABK, tetapi anak-anak di Labschool Rumah Citta mempunyai keterampilan sosial yang baik, karena anak-anak di Labschool Rumah Citta dapat bermain bersama tanpa ada kesenjangan antara ABK dan anak biasa.

Fakta di atas menarik peneliti untuk melakukan penelitian evaluasi program pendidikan inklusi di Sekolah Labcschool Rumah Citta yang menjadi salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang telah menerapkan pendidikan inklusi. Selain itu, aspek kebutuhan lembaga untuk mengevaluasi program pendidikan inklusi yang telah dilaksanakan selama 11 tahun, sehingga lembaga mengetahui sampai dimana pencapaian program sesuai dengan tujuan dan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari program yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, peneliti melakukan evaluasi program di Labschool Rumah Citta.

## **B. Fokus Penelitian**

Uraian dari latar belakang masalah, maka evaluasi program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di Sekolah Labcschool Rumah Citta memfokuskan penelitian tentang deskripsi tujuan dan implementasi program serta pengambilan keputusan yang berdasarkan pada 3 tahapan program model *countenance* dari Stake, meliputi:

1. Konteks (*antecedents*), pada tahap anteseden evaluasi, melihat: (a) dasar lembaga; (b) sumber daya manusia; (c) sarana dan prasana; (d) pengelolaan keuangan; dan (e) kurikulum.
2. Proses (*transaction*), evaluasi pada tahap transaksi menekankan pada implementasi pelaksanaan program pendidikan inklusi di lembaga pendidikan anak usia dini dan peran serta orang tua maupun masyarakat, meliputi: (a) asesmen input dan tindak lanjut; dan (b) pembelajaran.
3. Keluaran (*output* atau *outcome*), tahap terakhir evaluasi yaitu keluaran. Tahapan ini digunakan untuk menilai manfaat dan dampak dari program pendidikan inklusi, meliputi: (a) orang tua; dan (b) anak dan alumni.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah di atas yang menggunakan model evaluasi *countenance* dari Stake, peneliti menarik rumusan masalah pada tiga tahapan, yaitu:

1. Konteks (*antecedents*), tahapan evaluasi sebelum program dilaksanakan, meliputi:
  - a. Bagaimana landasan pemikiran, tujuan penyelenggaraan, dan penerimaan peserta didik dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di Labcshool Rumah Citta?



- b. Bagaimana sumber daya manusia dalam melaksanakan pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di Labcshool Rumah Citta?
  - c. Bagaimana pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di Labcshool Rumah Citta?
  - d. Bagaimana kurikulum pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di Labcshool Rumah Citta?
2. Proses (*transaction*), tahap evaluasi implementasi program, meliputi:
- a. Bagaimana asesmen dan tidak lanjut program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di Labcshool Rumah Citta?
  - b. Bagaimana pembelajaran pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di Labcshool Rumah Citta, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian?
3. Keluaran (*output atau outcome*), tahap evaluasi keluaran dari implementasi program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini, meliputi:
- a. Bagaimana manfaat program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di Labcshool Rumah Citta bagi anak, orang tua, dan alumni?
  - b. Bagaimana peran serta orang tua dalam melaksanakan program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di Labcshool Rumah Citta?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan *follow up* penggunaan informasi dari hasil atau temuan penelitian. Penelitian yang dilakukan pasti memberi manfaat baik bagi objek, peneliti pada khususnya dan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Penelitian evaluasi diharapkan dapat memberikan manfaat baik segi teoritis maupun praktis.

### **1. Segi teoritis**

Kegunaan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain:

- a. Hasil penelitian digunakan untuk mengkaji dan menjabarkan lebih dalam tentang implementasi pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini,
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam memfasilitasi setiap kebutuhan anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus pada khususnya,
- c. Hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini

### **2. Segi praktis**

Kegunaan penelitian dilihat dari segi praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendidik, lembaga sekolah, *stakeholder*, orang tua dan masyarakat, serta peneliti.

- a. Bagi pendidik, hasil penelitian evaluasi program dapat menjadi penilaian dan perbaikan bagi kualitas tenaga pendidik dan meningkatkan *skill* dalam pembelajaran pendidikan inklusi,
- b. Bagi lembaga sekolah, dengan adanya penelitian evaluasi program pendidikan inklusi diharapkan pihak sekolah mengetahui kekurangan dan kelebihan program sehingga dapat menjadi pijakan dalam memperbaiki maupun meningkatkan kualitas program,
- c. Bagi *stakeholder*, hasil penelitian evaluasi program pendidikan inklusi di PAUD dapat menjadi rujukan dalam mengambil kebijakan bagi peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini,
- d. Bagi orang tua dan masyarakat, orang tua dan masyarakat dapat menerima nilai-nilai inklusifitas atau perbedaan, memberikan kesempatan pada anak untuk bersosialisasi dan mendapat pendidikan yang layak,
- e. Bagi peneliti, dapat mengembangkan keilmuan dalam melayani anak-anak yang mempunyai kebutuhan baik secara fisik atau mental, sosial ekonomi, budaya, kesulitan belajar maupun anak berbakat pada usia dini.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Konsep Evaluasi Program

Penelitian evaluasi merupakan salah satu penelitian terapan yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, program, dan proyek. “Penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat (*worth*) dari suatu praktik (pendidikan)”.<sup>8</sup> Spaulding mengatakan *“a common definition used separate program evaluation from research is that program evaluation is conducted for decision-making purposes, whereas research is intended to build our general understanding and knowledge of a particular topic and to inform practice”*.<sup>9</sup> Pendapat Spaulding menjelaskan bahwa evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk pengambilan keputusan, sedangkan dalam penelitian evaluasi program bertujuan untuk membangun pemahaman dan pengetahuan tentang topik tertentu. Evaluasi program merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan nilai pada sebuah program yang sudah berjalan.

Penelitian evaluasi program berisi tentang kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk membuat keputusan tentang program (melanjutkan,

---

<sup>8</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 120.

<sup>9</sup> Dean T. Spaulding, *Program Evaluation in Practice* (USA: Jossey-Bass, 2008), p. 5.

memperluas, memperbaiki atau menghentikan) program yang sedang berjalan.<sup>10</sup> Evaluasi program merupakan salah satu metode penelitian terapan dibidang pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi sebuah kebijakan atau program. Evaluasi program “*as the application of evaluation approaches, techniques, and knowledge to systematically assess and improve the planning, implementation, and effectiveness of programs.*”<sup>11</sup> Pendapat di atas menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan sebuah penerapan pendekatan evaluasi, teknik, dan pengetahuan yang digunakan untuk menaksir suatu sistem dan perencanaan perbaikan, mengimplikasi, dan keefektifan program. Evaluasi program mencakup pokok bahasan yang lebih luas dari evaluasi kurikulum sampai kepada evaluasi program dalam suatu bidang studi, seperti: kebijakan, implementasi, dan efektifitas program.<sup>12</sup> Evaluasi program dilaksanakan untuk mengetahui efektifan program dalam implementasi di suatu lembaga yang melibatkan banyak aspek seperti kurikulum, pembelajaran, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan lingkungan.

Evaluasi program pada penelitian merupakan upaya untuk menerapkan fungsi-fungsi ilmu pengetahuan seperti untuk memahami (*to perceive*), menjelaskan (*to explain*), meramalkan (*to predict*), dan

---

<sup>10</sup> Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan* (Jakarta: Alfabeta, 2013), h. 109.

<sup>11</sup> Huey-Tsyh Chen, *Practical Program Evaluation* (New Delhi: Sage Publication, 2005), h. 3.

<sup>12</sup> Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan operasionalnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.5.

mengendalikan (*to control*) suatu gejala, fenomena, keadaan, peristiwa, atau program.<sup>13</sup> Penelitian evaluasi program bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan pada suatu gejala atau keadaan program tertentu. Hasil evaluasi program yang dilaksanakan dapat disosialisasi kepada publik sehingga publik dapat menilai tentang efektifitas program dan dapat memberikan dukungan. Selain itu, hasil evaluasi program dapat dijadikan dasar bagi pembuatan keputusan tentang pelaksanaan program selanjutnya akan dilanjutkan, dihentikan, atau diperbaiki sehingga pihak-pihak yang terkait dapat ikut serta berpartisipasi dalam mendukung peningkatan kualitas program. Berdasarkan berbagai teori yang telah dijabarkan oleh para ahli, maka evaluasi program disimpulkan sebagai salah satu pendekatan metode dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan menilai keefektifan suatu program yang telah dilaksanakan yang kemudian mengambil keputusan dari hasil pengukuran dan penilaian program untuk memberikan berbagai rekomendasi perbaikan maupun peningkatan program.

## **B. Konsep Pendidikan Inklusi**

### **1. Kebijakan Pendidikan Inklusi**

Kebijakan pendidikan sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan keputusan atau program pendidikan. Kebijakan pendidikan

---

<sup>13</sup> Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 22.

merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pendidikan. Kebijakan pendidikan diatur dalam UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya serta pendidikan inklusi pada khususnya telah diatur di dalam Undang-Undang dan kebijakan pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap pendidikan inklusi dituangkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, perlakuan, aksesibilitas, rehabilitasi serta hak yang sama. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana dalam Undang-Undang ini hak dan kewajiban serta perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu baik yang mengalami kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, memiliki bakat istimewa, dan yang tinggal di daerah terpencil. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, penilaian, serta pembiayaan. Selain itu, semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua menggambarkan bahwa keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak harus terkotak-kotak melainkan

harus disatukan menjadi kekayaan bangsa. Berbagai aturan dan konsep yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang maupun peraturan yang telah ditetapkan sehingga pendidikan inklusi merupakan program pendidikan yang dapat memenuhi hak semua warga Indonesia secara umum dan ABK secara khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi.

## **2. Hakikat Pendidikan Inklusi**

Pendidikan inklusi sering diartikan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus (cacat) untuk bersekolah di kelas reguler bersama dengan anak normal tanpa memahami kebutuhan anak. Secara garis besar pendidikan inklusi tidak hanya menggabungkan anak berkebutuhan khusus (cacat) dengan anak normal di kelas reguler tetapi memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi sehingga tercipta kelas keberagaman. Makna pendidikan inklusi lebih luas tidak hanya untuk anak yang memiliki kebutuhan fisik maupun mental tetapi juga ditujukan untuk anak-anak yang mempunyai keberagaman seperti agama, gender, sosial ekonomi, bahasa, ras, budaya bahkan anak berbakat. Melalui pendidikan inklusi ini diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Inklusi berasal dari bahasa inggris "*inclusion*". Inklusi diartikan sebagai usaha menyatukan anak-



anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realitis dan komperhensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh.<sup>14</sup> Inklusi adalah salah satu cara yang komperhensif dalam bidang pendidikan untuk menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan anak-anak normal sehingga terjalin rasa saling menghormati.

Inklusi merupakan suatu yang nyata dan menyeluruh dalam bidang pendidikan untuk memberikan pelayanan pada anak-anak yang mempunyai hambatan atau keterbatasan. *“Inclusion has been described as provision for all students including those with disabilities, giving (equitable opportunities to receive effective educational services)”*.<sup>15</sup> Inklusi memberikan kesempatan pada anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang efektif di kelas reguler bersama anak-anak normal. Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara serta dapat menjadi strategi dalam mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat.<sup>16</sup> Pendidikan inklusi menjadi salah satu solusi dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan

---

<sup>14</sup> J. David Smith, *Inklusi: Sekolah Ramah untuk Semua* terjemahan Denis, Ny. Enrica (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), h. 45.

<sup>15</sup> Michael Farrell, *Debating Special Education* (London and New York: Routledge, 2010), p. 105.

<sup>16</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusi: Konsep dan aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 24.

pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusi mencerminkan pendidikan yang diperuntukan bagi semua anak tanpa terkecuali baik keterbatasan secara mental, fisik, komunikasi, sosial maupun finansial.

Pendidikan inklusi adalah sebuah paradigma yang humanis dan falsafah pendidikan yang dapat mengakomodasi semua peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, selain itu pendidikan inklusi adalah pendidikan yang tidak diskriminatif yang memberikan layanan terhadap semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa, dan sebagainya.<sup>17</sup> Pendidikan inklusi mencerminkan tentang keberagaman yang meliputi: agama, ekonomi, budaya, gender, bahasa, dan anak berkebutuhan. Inklusi adalah mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus secara penuh waktu dalam kelas reguler.<sup>18</sup> Pada pendidikan inklusi anak yang memiliki kebutuhan khusus mendapat pelayanan di kelas reguler dengan waktu penuh. Pelaksanaan pendidikan inklusi menurut UNESCO mestinya sekolah menerima, merawat, mendidik anak tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, fisik, intelektual, sosial, linguistik atau karakter lainnya.

Perubahan paradigma dalam bidang pendidikan didasarkan pada pendidikan untuk semua anak. Pendidikan yang melayani, menerima,

---

<sup>17</sup> Dedy Kustawan, *Manajemen Pendidikan Inklusi* (Jakarta: Luxima, 2013), h. 12-13.

<sup>18</sup> John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan buku 1 terjemahan Diana Angelica* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 274.

mengakui, memberikan kesempatan, dan memberikan penghargaan kepada setiap anak sesuai dengan pencapaian kemampuannya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana parasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.<sup>19</sup> Lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan setiap individu baik kurikulum, sarana-prasaran, pembelajaran, dsb. Pendidikan inklusi dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada semua anak yang mengalami kebutuhan dengan tidak mendiskriminasikan.

Tujuan pendidikan inklusi antara lain: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelaian fisik, sosial, emosional, mental, maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; serta (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik.<sup>20</sup>

Menurut pendapat Smith di atas, pendidikan inklusi bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan tanpa diskriminasi sehingga mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dan melaksanakan pendidikan yang menekankan pada keberagaman. Dalam pelaksanaan pendidikan

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Dirjen PKK-LK, 2007), h. 4.

<sup>20</sup> J. David Smith, op. cit., h. 41.

inklusi pihak sekolah harus melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, sistem pembelajaran maupun lingkungan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (anak). Pendidikan inklusi berusaha mengakomodasi segala bentuk perbedaan dari anak, memberikan penghargaan dan kesempatan serta peluang yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak.

Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan, yaitu: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya; (2) membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar; (3) membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengahdengankan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah; (4) menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran; (5) memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 32 ayat 1, UU no. 20 tahun 2003 khususnya Pasal 5 ayat 1, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51.<sup>21</sup>

Fungsi pendidikan inklusi adalah untuk menjamin semua peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan bermutu diberbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi peserta didik

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 10-11.

berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensinya secara optimal.<sup>22</sup> Selain memiliki fungsi, pendidikan inklusi juga memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain: peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik pada umumnya, orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat. Allen dan Schwartz mengungkapkan manfaat lingkungan yang inklusif untuk anak yang memiliki kebutuhan, antara lain: (1) lebih merangsang, memiliki keberagaman dan reponsif; (2) memungkinkan perkembangan kurikulum; (3) memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan anak lain dan meningkatkan kemampuannya; serta (4) memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk belajar akademis dari teman sebaya.<sup>23</sup> Manfaat pendidikan inklusi untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri, memiliki kesempatan menyesuaikan diri, dan memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan di masyarakat, sedangkan peserta didik pada umumnya dapat belajar mengenai keterbatasan, kelebihan, dan keunikan tertentu pada temannya sehingga dapat mengembangkan keterampilan sosial, menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap orang lain.<sup>24</sup> Bagi orang tua, pendidikan inklusi memberikan penghargaan bagi anak yang berkebutuhan dan mengetahui cara membimbing serta berinteraksi terhadap kegiatan belajar anak. Pelaksanaan pendidikan inklusi dapat membuat guru lebih kreatif dan

---

<sup>22</sup> Dedy Kustawan, *op. cit.*, h. 16.

<sup>23</sup> Allen dan Schwartz dalam J. David Smith, *op. cit.*, h. 424.

<sup>24</sup> Dedy Kustawan, *op. cit.*, h. 18.

terampil dalam mendidik serta dapat lebih mengenali peta kekuatan dan kelemahan setiap peserta didik.

Schultz mengemukakan sepuluh kategori utama sebagai prasyarat sekolah lebih ramah dan inklusif, yaitu: (1) sikap (*attitudes*); (2) persahabatan (*relationship*); (3) dukungan bagi siswa (*support of students*); (4) dukungan untuk guru (*support of teacher*); (5) kepemimpinan administrasi (*administrative leadership*); (6) kurikulum (*curriculum*); (7) penilaian (*assesment*); (8) program dan evaluasi staf (*program and staff evaluation*); (9) keterlibatan orang tua (*parental involvement*); dan (10) keterlibatan masyarakat (*community involvement*).<sup>25</sup>

Rasa percaya bahwa inklusi yang lebih besar dapat menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang meningkat bagi semua. Persahabatan antara anak dengan atau tanpa hambatan adalah sebuah norma. Sekolah memberikan dukungan sumber daya lain untuk memberikan layanan kepada anak berkebutuhan. Sekolah memberikan berbagai pelatihan pada guru untuk menangani jumlah keberagaman anak yang lebih berbeda. Kepala sekolah dan staf harus bekerjasama dalam memberikan dukungan pada implementasi pendidikan inklusi. Kurikulum yang digunakan harus cukup fleksibel. Penilaian dilakukan untuk memberi gambaran akhir tentang tentang pencapaian prestasi dan tujuan belajar setiap anak. Sistem evaluasi harus digunakan untuk menilai keberhasilan program dan staf pada pendidikan inklusi. Keterlibatan orang tua bertujuan untuk memahami rencana dalam membentuk lingkungan inklusif dan ramah bagi anak. Pihak

---

<sup>25</sup> Schultz dalam J. David Smith, *op. cit.*, h. 399-400.

sekolah melibatkan masyarakat dalam usaha meningkatkan keterlibatan dan penerimaan anak yang memiliki kebutuhan khusus di dalam sekolah. Sepuluh poin di atas menjadi syarat utama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di sekolah. Sepuluh prasyarat tersebut digunakan sebagai dasar dalam menciptakan sekolah inklusi yang lebih ramah dan inklusif. Prasyarat tersebut harus dilaksanakan dalam tim. Dari berbagai penjabaran di atas pendidikan inklusi dapat disimpulkan sebagai suatu paradigma pendidikan yang memberikan pelayanan pada semua anak tanpa diskriminasi (membeda-bedakan), menghargai keberagaman, serta sikap menerima, mengakui, memberikan kesempatan, dan memberikan penghargaan kepada anak yang memiliki kelainan atau hambatan baik hambatan secara temporer maupun permanen untuk memenuhi kebutuhan setiap anak dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

### **3. Implementasi Pendidikan Inklusi**

Implementasi pendidikan inklusi tidak hanya sebuah program pendidikan di sebuah sekolah reguler yang hanya menerima anak berbagai kebutuhan tanpa memberikan kesempatan dan pengakuan yang sama. Konsep dasar pendidikan inklusi adalah sebuah program pendidikan yang bertujuan untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pendidikan inklusi, sebagai berikut: (1) menciptakan dan menjaga komunikasi kelas yang hangat, menerima keragaman, dan menghargai perbedaan; (2) mengajarkan kelas yang heterogen memelurkan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar; (3) menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif; (4) penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus-menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan profesi; dan (5) melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan.<sup>26</sup>

Lembaga yang melaksanakan layanan pendidikan inklusi sekolah atau lembaga pendidikan anak usia dini harus melaksanakan berbagai persiapan antara lain: sumber daya manusia, saran dan prasarana penunjang serta mempertimbangkan kemampuan sekolah atau lembaga pendidikan anak usia dini agar dapat memberikan layanan pendidikan yang baik. Pendidikan inklusi dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap hak-hak anak dan menghargai segala macam perbedaan yang dimiliki anak dengan memfasilitasi kebutuhan setiap anak. Pada Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 telah dijelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini termasuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, sekolah harus memenuhi kebutuhan semua anak dalam komunitasnya, apapun kemampuannya. Pendidikan inklusi tidak menuntut anak dengan kebutuhan khusus menyesuaikan diri dengan lingkungan atau

---

<sup>26</sup> Sambutan Kepala Bidang PNFI DIKPORA Provinsi DIY pada Acara Talkshow dan Workshop PAUD Inklusi pada tanggal 10 Maret 2012.



kehidupan masyarakat normal tetapi mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>27</sup> Program pendidikan yang diberikan pada sekolah inklusi menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan menekankan pada pengembangan kemampuan keterampilan hidup dan sosialisasi dengan lingkungan.

Foreman menjelaskan pentingnya pendidikan inklusi ditinjau dari hasil-hasil penelitian, yaitu: (1) sekolah khusus atau sekolah luar biasa tidak memberikan kemampuan sosial dan akademis yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah reguler, terutama bagi siswa yang tergolong cacat ringan; (2) anak dapat memperoleh keuntungan dari sekolah inklusif, meskipun anak tergolong pada cacat berat dan cacat ganda; dan (3) telah diterima secara luas tentang hak semua orang untuk berpartisipasi penuh dalam arus utama kehidupan masyarakat (*the mainstreaming community*).<sup>28</sup>

Pelaksanaan pendidikan inklusi dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan amanat Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang pendidikan. Masyarakat juga mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pendidikan inklusi, yaitu memaksimalkan potensi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dan dapat menyumbangkan pemikiran, ide atau pendapat untuk mengembangkan pendidikan yang lebih terbuka dan penuh kesadaran. Sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi akan menjadi sekolah yang ramah dan terbuka untuk semua serta tidak diskriminasi. Pada dasarnya konsep dasar pendidikan inklusi adalah

---

<sup>27</sup> Yuliani Nurani Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Indeks, 2012), h. 169.

<sup>28</sup> Foreman dalam Ibid, h. 170.

menerima, memberi pengakuan, memberikan kesempatan, dan memberi penghargaan. Menerima semua anak dengan berbagai kebutuhan dengan tidak menggolongkan, mengelompokan, dan memberikan perlakuan khusus. Memberikan pengakuan pada anak yang memiliki kebutuhan sama seperti anak yang lain. Memberikan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan dan pelayanan dalam semua bidang sehingga anak dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Memberikan penghargaan untuk pencapaian keberhasilan anak sesuai kemampuan anak. Oleh karena itu, pihak sekolah harus memberikan pelayanan pendidikan untuk semua anak tanpa membeda-bedakan atau mengklasifikasikan.

Menurut Smith dan Hilton menjelaskan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi, meliputi: (1) pengetahuan tentang berbagai kelainan atau hambatan; (2) dukungan dan sikap yang tepat, legal, etis, kerjasama dan metoda pengembangannya bersahabat; (3) adanya persiapan dan latihan bagi guru dan administrasi dalam penilaian dan kerjasama yang tinggi; (4) diperlukan praktek-praktek yang efektif dalam pengajaran langsung serta menyampikan materi pembelajaran, transisi, dan evaluasi hasil-hasil pendidikan; (5) tanggung jawab pelatihan dipikul oleh sekolah dan bersama-sama badan pendidikan lokal dan provinsi.<sup>29</sup>

Implementasikan program pendidikan inklusi didasarkan pada pengetahuan konsep inklusi secara menyeluruh sehingga dalam melaksanakan program inklusi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, tanggung jawab dan dukungan berbagai pihak menjadi faktor penentu

---

<sup>29</sup> Smith dan Hilton dalam J. David Smith, op. cit., h. 297-298.

keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. Seluruh elemen adalah sebuah tim yang saling mendukung, membantu dan melengkapi dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi dapat dilaksanakan diberbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut Miriam Donath Skjoerten bahwa seluruh anak termasuk juga anak yang mengalami hambatan dalam belajar, perkembangan, dan partisipasi termasuk anak penyandang cacat mempunyai hak yang sama untuk kualitas pendidikan dalam sebuah sekolah yang dekat dengan rumahnya dan sesuai dengan usianya.<sup>30</sup> Sekolah yang melaksanakan program pendidikan inklusi yang berkualitas harus menyediakan lingkungan yang ramah pembelajaran, merangkul dan mengenal keberagaman, dimana kurikulum, metode, dan pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik aspek sosial pembelajaran, kesensitifan terhadap kebutuhan serta ketertarikan anak. Program pendidikan inklusi ini dapat diterapkan pada PAUD (pendidikan anak usia dini).

PAUD inklusi merupakan lembaga PAUD yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan anak usia prasekolah dan anak penyandang cacat dalam program yang sama dari awal mempersiapkan pendidikan bagi semua anak

---

<sup>30</sup> UNESCO Jakarta and PLAN Indonesia, *Compendium "Agreements, Laws and Regulation Guaranteeing All Children Equal Right to Quality Education in an Inclusive Setting"* (Jakarta: Kemendikbud, 2006), p. 30.

untuk melaksanakan pendidikan untuk semua serta pendidikan dasar.<sup>31</sup> PAUD merupakan salah satu jenjang pendidikan dasar yang berfungsi menanamkan nilai-nilai karakter, membentuk sikap anak, melatih keterampilan hidup (*life skill*), dan mempersiapkan anak untuk kejenjang pendidikan selanjutnya terutama jenjang pendidikan formal. PAUD inklusi juga memiliki peran yang sama dalam pendidikan anak usia dini untuk menciptakan pendidikan untuk semua anak, mengenalkan serta menghargai perbedaan bahwa semua anak sama. Menurut keputusan kepala dinas pendidikan kota Yogyakarta bahwa dalam teknis penyelenggaraan pendidikan inklusi harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut: (1) tersedianya guru pembimbing khusus; (2) tersedianya sarana dan prasarana yang memperhatikan aksesibilitas sesuai kebutuhan; (3) memiliki program kegiatan yang bertujuan mengembangkan pendidikan inklusi; dan (4) memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi penting untuk di implementasikan pada pendidikan anak usia dini karena dapat mengenalkan keberagaman dan rasa empati. Rasio anak berkebutuhan khusus dengan anak lain dalam pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini harus mempertimbangkan tentang gangguan atau hambatan atau kebutuhan anak. Pada usia 4-6 tahun terdiri dari 2 anak yang memiliki berkebutuhan dan 15 anak biasa, sedangkan usia 3-4 tahun 1

---

<sup>31</sup> Mukhtar Latif, dkk, *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini (Teori dan Aplikasi)* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 323.

anak yang memiliki berkebutuhan berbanding 8 anak biasa.<sup>32</sup> Dalam kelas inklusi pada pendidikan anak usia dini setiap kelas usia 4-6 tahun terdiri dari 2 anak berkebutuhan dengan 15 anak dan 2 guru, sedangkan usia 3-4 tahun setiap kelas terdiri dari 1 anak berkebutuhan dengan 8 anak biasa dan 2 guru. Setiap kelas inklusi yang memiliki anak kebutuhan harus dianalisis kebutuhan dan hambatannya dan antara anak satu dengan yang lain harus memiliki kebutuhan yang berbeda.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini, antara lain: (1) kesamaan hak, hak yang sama untuk memperoleh pendidikan; (2) Kerja sama, penanganan untuk anak berkebutuhan harus dilakukan dalam tim, yaitu orang tua, pendidik, sekolah, pemerintah, psikolog, dsb; (3) perlakuan yang sama, dalam pendidikan inklusi semua anak harus diperlakukan sama sesuai kebutuhan; (4) perilaku mencontoh, salah satu faktor keberhasilan pendidikan inklusi adalah sejauh mana ABK dapat mencontoh perilaku normal; (5) penerimaan dan kehangatan, jika anak mendapatkan penerimaan dan kehangatan maka sangat mendorong motivasi anak; dan (6) anak berada di kelas reguler bersama-sama anak normal selama pembelajaran.<sup>33</sup>

Pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus memenuhi prinsip-prinsip kesamaan hak, kerja sama, setiap anak mendapatkan perlakuan yang sama, perilaku mencontoh, adanya penerimaan dan kehangatan, anak berada di kelas reguler secara penuh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat diberi kesempatan yang

---

<sup>32</sup> Masnival, *Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 334.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 333-334.

sama dalam proses pembelajaran. Bentuk gangguan atau hambatan dapat diminimalisir dengan diberi kesempatan untuk hal-hal, sebagai berikut: (1) dapat berinteraksi dengan teman dan orang dewasa dalam masyarakat berdasarkan keadilan dan kesetaraan; (2) mendapat dukungan dari lingkungan fisik yang aksesibel; (3) mendapat pembelajaran positif dari orang tua dan guru mengenai keterampilan; dan (4) bertemu serta belajar dari disabilitas lain yang menjadi sumber inspirasi.<sup>34</sup>

Berbagai bentuk gangguan pada anak berkebutuhan khusus dapat diminimalisir dengan memberikan penanganan yang tepat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun non fisik sehingga dapat bersosialisasi dengan orang lain tanpa adanya diskriminasi. Fasilitas yang dapat diakses dengan mudah dan mandiri tanpa bantuan orang lain akan mendukung anak berkebutuhan dapat hidup normal tanpa diskriminasi dan dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki sebagai *skill* yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekolah reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah, yaitu: (1) menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan; (2) siap mengelola kelas yang

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Tulkit LIRP-Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran, Buku Khusus 3: Mengajar Anak-Anak dengan Disabilitas dalam Setting Inklusif* (Jakarta: IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handicap International, Plan International, 2009), h. 17.

heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual; (3) harus menerapkan pembelajaran yang interaktif; (4) dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; serta (5) dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.<sup>35</sup>

Taman Kanak-Kanak di Anhui, Cina mempunyai program rintisan pendidikan inklusi untuk mendorong beberapa hal, antara lain: (1) anak belajar aktif dalam kelompok bermain; (2) terjalin hubungan yang lebih erat dengan keluarga; (3) menggunakan pendekatan seluruh sekolah (*wholeschool approach*) dan dukungan belajar teman sebaya; (4) dukungan dari administrator dan masyarakat setempat melalui pembentukan komite; (5) pelatihan guru berbasis sekolah secara berkesinambungan; (6) pengintegrasian anak tunagrahita secara bertahap.<sup>36</sup> Program Taman Kanak-Kanak inklusi dapat mendorong anak untuk belajar aktif ketika proses pembelajaran dan bermain dengan menggunakan dukungan belajar teman sebaya dimana teman dapat saling membantu. Dukungan untuk Taman Kanak-Kanak Inklusi sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan program, dukungan dapat diperoleh dari orang tua, masyarakat serta pemerintah salah satunya pembentukan komite sekolah yang dapat memberikan dukungan dan masukan. Berbagai pelatihan berbasis sekolah untuk pendidik harus selalu

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 6-7.

<sup>36</sup> Janet Holdsworth. "Anhui Cina, Taman Kanak-Kanak Inklusi" *buletin EENET no. 2*. [www.eenet.org.uk](http://www.eenet.org.uk) (diakses 13 Januari 2015).

dilakukan untuk dapat memfasilitasi siswa. Menggabungkan anak berkebutuhan pada umumnya dan tungrahita khususnya dengan anak normal dilakukan secara bertahap.

Penjabaran berbagai teori di atas menjelaskan bahwa implementasi pendidikan inklusi harus didasarkan pada pengetahuan guru tentang kebutuhan anak terutama kebutuhan khusus, kesamaan hak-hak anak, penerimaan, serta menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk tempat belajar anak dimana anak ABK dapat belajar bersama dengan anak biasa di kelas reguler dengan memberikan dukungan dan sikap yang tepat dengan bekerjasama dengan orang tua dan berbagai pihak sehingga dapat memberikan kemampuan sosial serta akademis bagi semua anak.

### **C. Anak-Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi**

#### **1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus**

Presentase anak berkebutuhan di dunia semakin meningkat salah satunya di Indonesia. Anak berkebutuhan meliputi: kebutuhan mental, fisik, kognisi, sosial emosional, dan kesulitan belajar. Anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 5 yaitu: (1) anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial sehingga berhak memperoleh pendidikan khusus; (2) anak yang berada di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat dengan adat yang terpencil berhak mendapatkan layanan khusus; dan (3) anak yang memiliki



potensi kecerdasan dan bakat istimewa.<sup>37</sup> Anak berkebutuhan khusus yang dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia adalah anak-anak yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, intelektual baik yang memiliki intelektual tinggi maupun rendah serta anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang berhak mendapat pendidikan dan layanan khusus sesuai kebutuhan anak.

Hallahan dan Kauffman menjelaskan anak berkelainan adalah anak yang berbeda dari rata-rata pada umumnya, dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, pengelihatannya, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak.<sup>38</sup> Anak berkelainan merupakan anak yang memiliki perbedaan dengan anak rata-rata pada umumnya maupun standar perkembangan dikarenakan ada faktor penyimpangan kemampuan anak. Individu berkebutuhan khusus adalah individu memiliki ciri-ciri khusus di dalam perkembangannya yang berbeda dari perkembangan secara normal, penyimpangan tersebut dapat berbentuk penyimpangan inteligensi; perilaku; perkembangan visual, auditori, fisik, maupun masalah belajar.<sup>39</sup> Pendapat Martini di atas menjelaskan bahwa individu yang berkebutuhan khusus memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak sesuai dengan perkembangan normal baik kurang maupun melebihi tahap perkembangan sesuai usia anak. Sedangkan

---

<sup>37</sup> Agustyawati dan Solicha, *Psikologi Pendidikan Anak berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 4.

<sup>38</sup> Hallahan dan Kauffman dalam Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 2.

<sup>39</sup> Martini Jamaris, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan* (Bogor: Ghalia, 2013), h. 184.

Suyanto berpendapat anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kebutuhan individual yang tidak bisa disamakan dengan anak yang normal.<sup>40</sup> Slamet Suyanto menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan individual yang berbeda dengan anak normal dengan membandingkan pada tahapan perkembangan anak seusianya.

George S. Morisson menjelaskan individu dengan pendidikan khusus adalah anak-anak dengan keterbatasan sebagai anak-anak dengan gangguan mental, pendengaran, bicara atau bahasa, emosi, ortopedis, kesehatan, trauma otak, dan gangguan belajar.<sup>41</sup> Individu dengan pendidikan khusus harus mendapatkan layanan pendidikan yang tepat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan menyediakan pendidikan untuk semua anak yang memiliki keterbatasan. Skjorten menjelaskan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang menghadapi hambatan dan perkembangan temporer, permanen atau disabiliti (kecacatan) yang tidak hanya disebabkan oleh kelainan tetapi juga dapat disebabkan oleh kondisi sosial, emosional, atau kultural.<sup>42</sup> Anak berkebutuhan khusus dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang disebabkan oleh genetik, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, emosional, kultural, infeksi, trauma,

---

<sup>40</sup> Slamet Suyanto, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), h. 202.

<sup>41</sup> George S. Morisson, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Indeks, 2012), h. 316.

<sup>42</sup> Skjorten dalam Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan Luar Biasa Menuju Anak Masa Depan yang Inklusif* (Jakarta: Luxima, 2014), h. 18.

serta kekurangan gizi. Potensi anak mengalami kebutuhan khusus dapat terjadi pada masa pre natal, perinatal, dan pasca natal. Berbagai penjabaran tentang anak berkebutuhan khusus, maka dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan perkembangan baik perbedaan secara intervidual maupun intravidual yang terjadi sangat signifikan dibandingkan dengan tahap perkembangan normal maupun dengan keadaan lingkungan serta mengalami kesulitan dalam berinteraksi sehingga membutuhkan penanganan, pendidikan, maupun pelayanan khusus dalam mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki anak.

## **2. Jenis Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi**

### **a. Anak Berkebutuhan Khusus Permanen**

Anak berkebutuhan khusus permanen adalah anak yang memiliki kelainan baik kelainan bawaan atau yang diperoleh kemudian, langsung atau tidak langsung akan menimbulkan hambatan dalam pembelajaran.<sup>43</sup> Anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus permanen harus mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

#### **1) Anak Berkebutuhan Fisik**

Anak yang berkebutuhan fisik merupakan anak yang mengalami keterbatasan fisik sehingga membuat anak kesulitan belajar. Jenis-jenis anak berkebutuhan fisik, antara lain: tunadaksa, tunanetra, dan tunarungu.

---

<sup>43</sup> Ibid, h. 19.

### a) Tunadaksa

Anak yang mengalami tunadaksa mengalami gangguan dalam aktivitas secara fisik, gangguan koordinasi gerak, keterbatasan sensorimotor, dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau kecelakaan termasuk *celebral palsy*, amputasi, polio, dan lumpuh.<sup>44</sup> Anak-anak tunadaksa adalah anak-anak yang mempunyai kelainan struktur tulang atau otot baik yang bersifat bawaan sejak lahir maupun disebabkan oleh kecelakaan saat lahir maupun pasca lahir. Anak yang mengalami kelainan struktur tulang dan *neuro-muskular* akan mengalami gangguan fisik baik ringan maupun berat, sehingga dapat membatasi aktivitas gerak anak. Individu dengan gangguan fisik atau motorik adalah individu yang mengalami gangguan otot, tulang, sendi atau sistem syaraf yang mengakibatkan kurang optimalnya fungsi komunikasi, mobilitas, sosialisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi.<sup>45</sup> Anak-anak yang memiliki gangguan fisik maupun otot akan mengalami gangguan dalam perkembangan komunikasi, mobilitas, sosialisasi, dan keutuhan pribadi. Tunadaksa merupakan ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal akibat luka, penyakit, atau

---

<sup>44</sup> Mudjito, dkk, Pendidikan Inklusif (Jakarta: baduose Media, 2012), h. 28.

<sup>45</sup> Dadan Rachmayana, *op. cit.*, h. 27.

pertumbuhan yang tidak sempurna.<sup>46</sup> Anak yang mengalami tunadaksa mengalami kesulitan dalam menggunakan fungsi anggota tubuh.

Tunadaksa dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kelainan sistem cerebral (*cerebral system*) dan kelainan pada sistem otot (*musculoskeletal system*).<sup>47</sup> Kelainan sistem cerebral adalah gangguan dari saraf otak yang berpengaruh terhadap gerak, sedangkan kelainan sistem otot merupakan gangguan pada sistem otot. Salah satu jenis kelainan sistem cerebral adalah *cerebral palsy*, yaitu suatu kondisi yang bersifat klinis yang disebabkan oleh cedera otak atau gangguan saraf otak sehingga dapat mengakibatkan pada gangguan gerak. Kondisi anak yang mengalami tunadaksa sebagian besar mengalami kesulitan belajar, gangguan pendengaran, gangguan pengelihat, gangguan persepsi, gangguan perkembangan kognitif, dan penyesuaian sosial. Penjabaran teori di atas disimpulkan bahwa anak tunadaksa merupakan anak yang mengalami gangguan pada struktur tulang maupun otot yang disebabkan oleh bawaan sejak lahir atau kecelakaan pasca lahir sehingga anak akan mengalami gangguan perkembangan baik kognitif, motorik, pengelihat, persepsi, komunikasi, sosial, dan keterbatasan gerak.

---

<sup>46</sup> Mohammad Efendi, *op. cit.*, h. 139.

<sup>47</sup> Mukhtar Latif, dkk, *op. cit.*, h. 305.

## b) Tunanetra

Tunanetra tergolong pada kelainan atau kebutuhan fisik. Koufman dan Hallahan mendefinisikan tunanetra adalah individu yang memiliki pengelihatian lemah atau akurasi pengelihatian 6/60.<sup>48</sup> Tunanetra mengalami kesulitan berorientasi dengan lingkungan sehingga mobilitas terganggu karena memiliki hambatan atau keterbatasan dalam pengelihatian. Tunanetra diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: buta total (*blind*) dan kurang melihat (*slow vision*). Penderita buta total tidak dapat menggunakan pengelihatian baik menggunakan alat bantu visual maupun tidak. Kurang melihat (*slow vision*) merupakan keadaan seseorang yang mempunyai keterbatasan visual dengan visus 20/70 tetapi dapat dibantu dengan menggunakan alat bantu visual sehingga dapat melihat dengan normal. *Visual acuity* adalah pengukuran terhadap ketajaman visual dari jarak 20 kaki.

Tugas pendidikan dalam menghadapi anak yang memiliki gangguan pengelihatian adalah dengan menentukan prosedur (menyentuh atau mendengar) dimana anak dapat belajar dengan baik, karena anak-anak yang mengalami buta tidak dapat menggunakan pengelihatian dalam pembelajaran, sehingga harus mengandalkan pendengaran dan sentuhan untuk belajar.<sup>49</sup> Anak-anak yang mengalami pengelihatian yang buruk atau kurang pengelihatian dapat dibantu dengan menggunakan alat visual atau

---

<sup>48</sup> Koufman dan Hallahan dalam Mudjito, dkk, op. cit., h. 26.

<sup>49</sup> John W. Santrock, *op. cit.*, 2012), h. 261.

penyesuaian media (diperbesar) sesuai kebutuhan anak untuk proses belajar. Anak-anak yang mengalami tunanetra tidak memiliki gangguan dalam perkembangan kognitifnya. Teori yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang mengalami tunanetra akan mengalami gangguan pengelihatannya yang dapat dibantu dengan kaca mata maupun anak yang mengalami buta total, tetapi anak tunanetra tidak mengalami gangguan pada perkembangan kognitifnya.

### **c) Tunarungu**

Anak-anak yang terlahir dengan gangguan pendengaran dan kehilangan pendengaran yang signifikan pada awal-awal tahun kehidupan akan mengalami kesulitan bahasa bahkan biasanya tidak mampu mengembangkan cara bicara yang normal. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen.<sup>50</sup> Individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran permanen menjadi hambatan yang tetap, sedangkan hambatan pendengaran yang tidak permanen dapat disembuhkan melalui medis atau dapat dikurangi dengan alat bantu dengar. Kelainan pendengaran (*hearing impairment*) merupakan kondisi yang menyebabkan individu yang bersangkutan kurang dapat atau tidak dapat mendengar suara.<sup>51</sup> Individu yang mengalami kelainan

---

<sup>50</sup> Mudjito, dkk, *op. cit.*, h. 27.

<sup>51</sup> Martini Jamaris, *op. cit.*, h. 213.

pendengaran biasanya disebabkan adanya gangguan pada organ pendengaran (telinga) sehingga mengalami hambatan dalam mendengar suara.

Kemampuan mendengar suara pada anak yang mengalami gangguan pendengaran sangat berpengaruh pada kemampuan bahasanya. Sastrawinata mengungkapkan beberapa masalah anak tunarungu terhadap kemampuan bahasanya, antara lain: miskin kosakata (bahasa terbatas); sulit mengartikan kata-kata abstrak, sulit menguasai irama dan gaya bahasa, serta sulit mengartikan ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan atau sindiran.<sup>52</sup> Anak yang mengalami tunarungu sering bahkan pasti mengalami gangguan dalam kemampuan bahasa dan bicara, tapi mempunyai kecerdasan sama seperti anak normal. Perkembangan kognisi anak tunarungu dipengaruhi oleh lingkungan dan metode pembelajaran yang tepat. Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu merupakan anak yang mengalami gangguan pendengaran yang dapat mengakibatkan gangguan perkembangan, sehingga anak akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena anak akan mengalami keterbatasan dalam kemampuan bahasa dan bicara, tetapi perkembangan kognitif anak tunarungu akan berkembang dengan baik jika menggunakan metode yang tepat dan lingkungan yang mendukung.

---

<sup>52</sup> Mohammad Efendi, *op. cit.*, h. 77.



## 2) Anak Berkebutuhan Kognisi

Anak-anak yang berkebutuhan kognisi merupakan anak-anak yang memiliki kemampuan kognisi yang berbeda baik kemampuan IQ nya di bawah rata-rata maupun di atas rata-rata.

### a) Tunagrahita

Tunagrahita juga sering disebut dengan retardasi mental. Anak yang memiliki keterbatasan mental mengalami hambatan dalam belajar, menyesuaikan diri, dan hambatan untuk melakukan berbagai fungsi kehidupan seperti keterampilan membantu dirinya sendiri. Tunagrahita merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi-fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri (berperilaku adaptif) yang mulai timbul sebelum usia 18 tahun.<sup>53</sup> Tunagrahita (retardasi mental) disebabkan oleh faktor genetik dan kerusakan otak.

Faktor turunan secara genetik dapat ditemui pada penderita sindrom down (*down syndrome*) yang mempunyai kromosom ekstra (ke-47) dan *fragile X syndrome* yang mempunyai kromosom X abnormal. Sindrom down (*down syndrome*) mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut: wajah bulat, tengkorak rata, tambahan lipatan kulit diatas kelopak kepala, lidah menjulur, tubuh pendek, keterbelakangan mental serta motorik, sedangkan *fragile X syndrome* mempunyai ciri-ciri wajah yang panjang, rahang yang menonjol,

---

<sup>53</sup> Dadan Rachmayana, *op. cit.*, h. 23.

telinga yang panjang, batak hidung rata, dan koordinasi yang buruk.<sup>54</sup> Faktor kerusakan otak dapat disebabkan oleh lingkungan, infeksi virus, luka, dan asupan makanan yang dapat menyebabkan peradangan pada otak.

### **b) Cerdas dan Bakat Istimewa (*Gifted dan Talented*)**

Anak berbakat termasuk ABK karena anak memiliki kecerdasan melebihi rata-rata anak normal sehingga dalam meningkatkan kemampuan anak diperlukan layanan khusus. Anak berbakat merupakan individu yang memiliki kemampuan unggul dan menunjukkan prestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman seusianya, sehingga membutuhkan penyesuaian layanan.<sup>55</sup> Anak berbakat memiliki kemampuan melebihi perkembangan normal dan mampu berprestasi baik dalam bidang akademik, seni, olahraga dan kepemimpinan. Tingkat kecerdasan dilihat dari intelektual (pikiran), emosi, kecerdasan jamak, dan keberbakatan. Ukuran keberbakatan bersumber pada kemampuan yang diperoleh dari penilaian hasil belajar, sehingga keberbakatan dapat menghasilkan produk yang kreatif, bermakna, dinamis, dan bertindak terhadap realitas.<sup>56</sup> Ukuran keberbakatan diukur dari tes penilaian dan kecerdasan, sehingga kemampuan itu dapat menghasilkan produk yang bernilai dan bermanfaat untuk orang lain. Berbagai pendapat di

---

<sup>54</sup> John W. Santrock, *op. cit.*, h. 257-258.

<sup>55</sup> Dadan Rachmayana, *op. cit.*, h. 28.

<sup>56</sup> Soegeng Santoso, *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini menurut pendirinya 1* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2012), h. 64.

atas dapat disimpulkan bahwa anak yang cerdas dan berbakat adalah anak yang memiliki kecerdasan maupun kemampuan rata-rata di atas norma dalam bidang tertentu.

### **3) Anak Berkebutuhan Sosial Emosional dan Perilaku**

Anak yang mempunyai kebutuhan sosial emosional dan perilaku akan mengalami gangguan dalam berinteraksi sosial, pengontrolan emosi, dan berperilaku.

#### **a) Gangguan Perilaku, Konsentrasi dan Perhatian**

Tunalaras dan ADHD merupakan gangguan emosional dan perilaku. Departemen Pendidikan AS tahun 2003 mendefinisikan gangguan emosional dan perilaku (*emotional and behavioral disorders*) terdiri dari masalah yang serius dan terus-menerus yang melibatkan hubungan, agresi, depresi, rasa takut yang berhubungan dengan persoalan pribadi atau sekolah, serta karakteristik sosioemosional lainnya yang tidak tepat.<sup>57</sup> Seorang anak yang mempunyai kelainan perilaku akan mengalami permasalahan intrapersonal maupun interpersonal, sehingga akan dimungkinkan untuk penyimpangan perilaku. Anak tunalaras mengalami gangguan pada perilaku dan emosionalnya, sehingga menimbulkan sikap suka melanggar peraturan dan norma yang menyebabkan kesulitan bagi anak sendiri dan orang lain dalam melakukan hubungan sosial.

---

<sup>57</sup> John W. Santrock, *op. cit.*, h. 266.

Gangguan konsentrasi dan perhatian sering dikenal dengan ADHD (*attention deficit hyperactive disorder*). Anak yang mengalami gangguan konsentrasi dan perhatian mengalami kesulitan atau tidak mampu memusatkan perhatian pada objek, tugas, informasi yang didengar maupun yang dilihat, dan mudah terangsang atau perhatian mudah teralihkan jika mendapat stimulasi dari luar sehingga anak yang mengalami gangguan konsentrasi dan perhatian memerlukan penyesuaian layanan pendidikan sesuai kebutuhan anak.

#### **b) Gangguan Spektrum Autisme (*Autism Spectrum Disorder*)**

Gangguan spektrum autis akan berdampak pada interaksi sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, serta perilaku repetitif. Gangguan spektrum autisme dapat dideteksi dini pada usia awal yaitu 3 tahun pertama. Autisme merupakan gejala kekacauan atau kelainan (*disorder*) perkembangan anak.<sup>58</sup> Ciri khas anak yang mengalami gangguan spektrum autisme adalah tidak merespon terhadap lingkungan sosial. Anak autisme mengalami kesulitan dalam kedekatan dengan orang lain; kerusakan hubungan sosial, karena anak autis mengalami gangguan non verbal behavior; kesulitan bahasa karena anak autis mengalami gangguan pendengaran sehingga menghambat komunikasi verbalnya; tabiat, anak autis sering kali menolak perubahan;

---

<sup>58</sup> Winarno, *Autisme dan Peran Pangan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 29-30.

kemampuan berintegrasi; dan kecerdasan pada anak autis rata-rata memiliki IQ kurang dari 70 tapi tidak menutup kemungkinan memiliki IQ di atas rata-rata. Gangguan spektrum autisme disebut juga gangguan perkembangan pervasif, gangguan ini berkisar dari gangguan yang berat disebut gangguan autistik sampai gangguan yang lebih ringan disebut *sindrom asperger*.<sup>59</sup> Kelompok spektrum autisme menurut PDD-NOS (*Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified*) terbagi menjadi lima, yaitu: (1) *autistic disorder (autism)*; (2) *asperger's syndrome*; (3) *atypical autism*; (4) *rett's syndrome*; serta (5) *childhood disintegrative disorders*.<sup>60</sup> Anak-anak yang mengalami gejala autisme berdampak pada interaksi sosial, komunikasi baik verbal maupun non verbal, membatasi diri dan munculnya perilaku stereotip.<sup>61</sup> Anak yang mengalami *sindrom autism* akan mengalami gangguan bahasa, sosial, dan perilaku.

### **c) Gangguan Bicara**

Anak yang mengalami kesulitan dalam memperoleh bahasa digolongkan kepada anak yang mengalami gangguan berbahasa atau gangguan bicara. Perkembangan bahasa anak tergantung pada lingkungan, pengalaman yang diperoleh anak selama masa perkembangan, maturasi

---

<sup>59</sup> John W. Santrock, *op. cit.*, h. 265.

<sup>60</sup> Mukhtar Latif, dkk, *op. cit.*, h. 300.

<sup>61</sup> Daniel C. Miller, *Best Practices in School Neuropsychology: Guidelines for Effective Practice, Assessment, and Evidence-Based Intervention* (USA: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010), p. 282.

otak dan kesiapan belajar berbicara. Menurut IDEA (*Individuals with Disabilities Education Act*) gangguan bicara mengacu pada komunikasi, artikulasi, bahasa, atau suara yang berdampak pada pembelajaran seorang anak.<sup>62</sup> Anak yang mengalami gangguan bicara bisa berupa gangguan komunikasi, artikulasi, bahasa, suara yang berakibat pada proses pembelajaran yang dilakukan anak. Faktor yang menyebabkan gangguan bicara pada anak, yaitu keterbatasan kognitif dan faktor keturunan<sup>63</sup>. Anak-anak yang mempunyai keterbatasan kognitif membuat anak kesulitan untuk mempelajari struktur bahasa. Sebagian anak yang terlambat berbicara mempunyai sejarah otitis media (peradangan dibagian tengah telinga) antara usia 12 sampai 18 bulan dan kemampuan bahasa meningkat ketika infeksi yang berkaitan dengan kehilangan kemampuan mendengar, sembuh.

Penyebab gangguan bicara dan bahasa pada anak dapat disebabkan dari proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otak, otot atau organ pembuat suara. Penyebab gangguan bicara, seperti gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik atau kromosom, autisme selektif, keterlambatan fungsional, afasia reseptif dan deprivasi lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan sepi, status ekonomi sosial, tehnik pengajaran salah dan sikap orangtua terhadap anak. Keterlambatan bicara fungsional hanya merupakan ketidakmatangan

---

<sup>62</sup> Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, *op. cit.*, h. 162.

<sup>63</sup> Diane E. Papalia, Sally Wendkos Old & Ruth Duskin Feldman, *Human Development* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 102.

fungsi bicara pada anak. Keterlambatan bicara organik atau nonfungsional adalah adanya gangguan bahasa reseptif, gangguan kemampuan pemecahan masalah visuo-motor. Keterlambatan bicara jenis disebabkan karena gangguan organ tubuh terutama adanya kelainan di otak. Keterlambatan bicara nonfungsional disertai dengan kelainan neurologis bawan, gangguan pendengaran, gangguan kecerdasan dan autisme.

### **b. Anak Berkebutuhan Khusus Temporer**

Anak berkebutuhan khusus temporer adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat sementara.<sup>64</sup> Anak yang memiliki kebutuhan khusus temporer ini disebabkan oleh kondisi lingkungan, jika kondisi di lingkungan sudah membaik, maka kebutuhan khusus terhadap layanan pendidikan akan berkurang bahkan sudah tidak ada.

#### **1) Gender**

Lintas budaya menunjukkan bahwa peran gender merupakan hal pertama yang dipelajari individu dan masyarakat memperlakukan laki-laki dan perempuan berbeda. Masyarakat lebih cenderung memperlakukan laki-laki lebih baik dan beranggapan anak laki-laki adalah sebuah kebanggaan. Halpern dan La May mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kemampuan verbal umum, aritmatika, penalaran

---

<sup>64</sup> Dadan Rachmayana, *op. cit.*, h. 32.

abstrak, visualisasi ruang, atau rentang daya ingat.<sup>65</sup> Secara genetika tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tapi sering ditemukan perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku disebabkan dari pengalaman yang berbeda termasuk kebiasaan orang dewasa yang memperkuat jenis perilaku yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Secara tradisional pengasuhan bayi laki-laki dan perempuan telah dibedakan dengan memberikan identitas melalui warna. Weaver-Hightower mengungkapkan guru biasanya tidak menyadari telah memperlihatkan ketidakadilan gender (*gender bias*) dalam pembelajaran, yaitu: memperkuat stereotip gender, mempertahankan pemisahan jenis kelamin, dan memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan berbeda sebagai siswa.<sup>66</sup> Ketidakadilan gender dapat dikurangi di sekolah. Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan sebuah identitas diri tentang jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang dilihat secara genetika tetapi tidak ada perbedaan dalam memberikan perlakuan spesial terhadap laki-laki atau perempuan.

## **2) Suku Bangsa, Ras, Etnis, dan Agama**

Indonesia mempunyai berbagai suku bangsa, ras, budaya, dan adat istiadat yang bermacam-macam sesuai dengan daerah tempat tinggal, bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui lima agama

---

<sup>65</sup> Halpern dan La May dalam Robert E. Slavin, *Psikologi Pendidikan "Teori dan Praktik" jilid 1 terjemahan Marianto Samosir* (Jakarta: Indeks, 2011), h. 156.

<sup>66</sup> Weaver-Hightower dalam Ibid, h. 158.



sehingga warga negara Indonesia memiliki identitas agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianut. Etnisitas merujuk pada pola karakteristik seperti warisan budaya, kebangsaan, ras, agama, dan bahasa.<sup>67</sup> Faktor utama dimana anak dibesarkan adalah asal-usul etnis anak. Lingkungan budaya, agama, dan adat istiadat dimana anak tinggal berpengaruh kepada karakter anak. Kelompok etnis adalah kelompok yang menjadi tempat orang mempunyai rasa identitas bersama, karena asal yang sama atau ras yang sama.<sup>68</sup> Kelompok etnis dimana anak tinggal akan menjadi identitas anak, misal: madura, jawa, batak, papua, cina, dsb. Kelompok etnis tersebut akan menjadi ciri khas bagi setiap orang untuk mengidentifikasi asal usul kelompok etnisnya.

Budaya dimiliki oleh setiap daerah atau negara sebagai ciri khas atau norma atau aturan. Budaya merujuk pada pola perilaku, keyakinan, dan semua hal yang dihasilkan dari sekelompok orang tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi.<sup>69</sup> Setiap daerah dan negara mempunyai budaya masing-masing dalam bermasyarakat. Setiap budaya dari suatu daerah maupun negara mempunyai nilai sebagai landasan filosofi atau norma. Latar belakang budaya masing-masing anak dipengaruhi oleh suku bangsa, status sosial ekonomi, agama, bahasa keluarga, jenis kelamin, serta pengalaman

---

<sup>67</sup> John W. Santrock, *op. cit.*, h. 198.

<sup>68</sup> Robert E. Slavin, *op. cit.*, h. 138.

<sup>69</sup> John W. Santrock, *op. cit.*, h. 191.

kelompok lain.<sup>70</sup> Pendapat di atas menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi latar belakang budaya. Latar belakang tersebut menjadi identitas budaya. Berbagai pendapat di atas dapat dijabarkan bahwa suku bangsa, ras, etnis, dan agama merupakan sebuah identitas yang dimiliki oleh individu, kelompok masyarakat, daerah, maupun negara sehingga akan menjadi norma yang akan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.

### **3) Status Sosial Ekonomi**

Status sosial ekonomi banyak mempengaruhi dalam implementasi pendidikan. Orang-orang berpendapat bahwa status sosial ekonomi yang tinggi pasti akan mendapat pelayanan pendidikan yang baik, sedangkan bagi status sosial yang rendah tidak akan mendapatkan pelayanan pendidikan. Menurut Fauth, Ryan dan Brooks-Gunn sekolah-sekolah yang diikuti oleh anak-anak dari latar belakang keluarga yang miskin sering kali mempunyai acuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lingkungan yang berpenghasilan lebih tinggi.<sup>71</sup> Anak-anak yang berada pada lingkungan yang berpenghasilan rendah cenderung mempunyai prestasi lebih rendah. Hal ini dikarenakan lingkungan yang tidak mendukung baik lingkungan rumah maupun sekolah. Status sosial ekonomi mengacu pada dua hal yaitu kelas ekonomi dan kelas sosial.

---

<sup>70</sup> Robert E. Slavin, *op. cit.*, h. 127.

<sup>71</sup> Fauth, Ryan dan Brooks-Gunn dalam John W. Santrock, *op. cit.*, h. 196.

Kelas ekonomi lebih sering ditandai atau diukur dari kombinasi penghasilan dan pendidikan. Sedangkan kelas sosial menunjukkan tingkatan penghasilan dan pendidikan. Pada kelas sosial terdapat seperangkat perilaku, harapan, dan sikap yang dipengaruhi dengan faktor budaya lain.<sup>72</sup> Status sosial ekonomi berpengaruh terhadap pola asuh dan budaya yang diterapkan dalam suatu keluarga. Anak-anak yang berada di kondisi sosial terpinggirkan atau menjadi kalangan minoritas dan anak-anak secara ekonomi kurang beruntung juga mempunyai kebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan.<sup>73</sup> Anak-anak yang berada pada status sosial yang kurang beruntung seperti anak-anak yang berada pada daerah konflik, anak jalanan, korban narkoba maupun kekerasan seksual, anak yang menderita penyakit kronis, dan anak yang lahir diluar nikah juga mempunyai kebutuhan untuk dapat dilayani disekolah tanpa membedakan-bedakan latar belakang.

## **D. Komponen Program Pendidikan Inklusi**

### **1. Manajemen Pendidikan Inklusi**

Manajemen merupakan kegiatan administratif dalam mengelola suatu sistem. Menurut Griffin, manajemen adalah seperangkat aktivitas yang meliputi: perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian,

---

<sup>72</sup> Robert E. Slavin, *op. cit.*, h. 128.

<sup>73</sup> Dadan Rachmayana, *op. cit.*, h. 33.

pengarahan, serta pengawasan yang dilaksanakan langsung oleh suatu sumber daya organisasi (manusia, uang, benda-benda fisik, dan informasi).<sup>74</sup> Pendapat di atas menjelaskan bahwa manajemen sebuah sistem yang dilakukan oleh sumber daya organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sehingga pelaksanaan organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Manajemen sumber daya pendidikan adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan terhadap faktor yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan proses pendidikan untuk mencapai tujuan (produktivitas dan kualitas) serta efektif dan efisien.<sup>75</sup> Sumber daya pendidikan berhubungan dengan bagaimana pengelolaan pendidikan dalam melaksanakan proses pendidikan sehingga tercapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen pendidikan inklusi berfungsi sebagai berikut: perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pengarahan (*directing*); pengkoordinasian (*coordinating*); pengawasan (*controlling*); penilaian (*evaluation*).<sup>76</sup> Manajemen menjadi seperangkat aktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengawasi jalannya suatu program.

---

<sup>74</sup> Ricky W. Griffin dalam Maisah, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Referensi, 2013), h. 1.

<sup>75</sup> Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, *Manajemen Sumber Daya Pendidikan* (Bandung: Pustakasetia, 2014), h. 37.

<sup>76</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 28.

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia termasuk dalam manajemen, terutama dalam pendidikan. Sumber daya manusia dalam pendidikan, meliputi guru, staf, kepala sekolah, murid dan orang tua. Gay Dessler mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai proses penerimaan, pelatihan, penilaian, kepuasan kerja, memberikan layanan kesehatan dan keamanan.<sup>77</sup> Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini meliputi: guru, karyawan, dan kepala sekolah. Orang tua, masyarakat, pemerintah, terapis dan tenaga kesehatan juga berperan dalam implementasi pendidikan inklusi.

#### **1) Peserta Didik**

Peserta didik menjadi komponen utama dalam proses pendidikan. Peserta didik merupakan objek sekaligus subjek dalam pendidikan. Peserta didik dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang bermutu.<sup>78</sup> Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa peserta didik merupakan individu yang membutuhkan upaya pembinaan dan pendampingan dari orang lain untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan potensi yang di miliki. Manajemen

---

<sup>77</sup> Gay Dessler dalam Maisah, *op. cit.*, h. 55.

<sup>78</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

peserta didik merupakan substansi pokok karena sentral layanan pendidikan ditujukan kepada peserta didik. *Children in an inclusive classroom are children with and without disabilities.*<sup>79</sup> Peserta didik pada kelas inklusi terdiri dari anak yang memiliki dan tidak memiliki kebutuhan khusus. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik PAUD kelas inklusi adalah anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus dan anak-anak biasa yang berada pada usia 0-8 tahun.

## **2) Tenaga Pendidik dan Kependidikan**

Seorang guru harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, yaitu mengajar atau mendidik. Guru di kelas inklusi adalah guru reguler pada pendidikan anak usia dini, sehingga kualifikasi guru pendidikan inklusi mengacu pada pendidikan anak usia dini. Pendidik PAUD sebagai sumber belajar dan merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan program pendidikan anak usia dini, karena pendidik terlibat langsung dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran.<sup>80</sup> Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 6 telah disebutkan bahwa pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,

---

<sup>79</sup> Regina Miller, *The Developmentally Appropriate Inclusive Classroom In Early Education* (United states of America: Delmar Publishers, 1996), p. 22.

<sup>80</sup> Ibid, h. 97.

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Persyaratan tenaga pendidik dan kependidikan di pendidikan anak usia dini meliputi: (1) tenaga pendidik memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) di bidang pendidikan anak usia dini dan psikologi yang memiliki sertifikasi guru PAUD; (2) memiliki tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, administrasi, pustakawan, dan tenaga kebersihan; (3) menyediakan tenaga kesehatan dan psikolog yang telah memiliki izin praktek.<sup>81</sup>

Kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Seluruh kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru saling terintegrasi. Selain keempat kompetensi di atas, pendidik pada sekolah inklusi harus mempunyai kompetensi khusus. Dalam pedoman umum sekolah inklusi (Dit. PPK-LK), kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah inklusi, meliputi: (1) kemampuan umum (*general ability*); (2) kemampuan dasar (*basic ability*); dan (3) Kemampuan khusus (*specific ability*).<sup>82</sup> Kemampuan umum diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal), sedangkan kemampuan dasar menjadi kemampuan tambahan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus dan kemampuan khusus kemampuan yang digunakan untuk mendidik peserta didik dengan kebutuhan

---

<sup>81</sup> Yuliani Nurani Sujiono, op. cit., h. 22.

<sup>82</sup> Mudjito, dkk, op. cit., h. 53.

husus tertentu (spesialis). Kompetensi guru PAUD, meliputi kemampuan: (1) mengenal anak secara mendalam; (2) menguasai profil perkembangan fisik dan psikologi anak; (3) menyelenggarakan kegiatan bermain yang menstimulasi tumbuh kembang anak sebagai pribadi yang utuh.<sup>83</sup> Kemampuan-kemampuan di atas wajib dimiliki guru untuk dapat memfasilitasi setiap anak.

Tugas guru kelas pendidikan inklusi, antara lain: (1) menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas atau sekolah; (2) menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan anak; (3) menyusun program pembelajaran individual (PPI) bersama-sama dengan guru pendidikan khusus (GPK); (4) melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian untuk semua mata pelajaran atau perkembangan sesuai tanggung jawab guru; (5) memberikan program remedi pengajaran (*remedial teaching*), pengayaan atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan; serta (6) melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugas guru.<sup>84</sup>

Tugas guru pendamping, antara lain: (1) membantu guru kelas menyiapkan kegiatan; (2) membimbing menyelesaikan tugas peserta didik berkebutuhan khusus; (3) menyiapkan permainan terstruktur (*indoor dan out door*); (4) mengalihkan obsesi anak berkebutuhan khusus terhadap benda tertentu; (5) mengurangi tingkah laku anak berkebutuhan yang berulang-ulang; dan (6) melakukan asesment dan tindak lanjut.<sup>85</sup> Guru pendamping

---

<sup>83</sup> Martuti, *Mendidikan dan Mengelola PAUD (Manajemen, Administrasi & Strategi Pembelajaran)* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h. 51.

<sup>84</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 21.

<sup>85</sup> Dedy Kustawan, *op. cit.*, h. 132-133.



lebih berfokus dan bertanggung jawab kepada pencapaian perkembangan anak berkebutuhan yang didampingi dengan berkerjasama dengan guru kelas. Berbagai teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan adalah individu yang memiliki kualifikasi pendidikan dan skill dalam pendidikan inklusi, khusus, maupun anak usia dini yang bertugas untuk menstimulasi serta mengoptimalkan perkembangan anak.

### **3) Orang Tua**

Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dibebankan pada pihak sekolah dan guru. Orang tua, masyarakat dan lingkungan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak. Partisipasi orang tua dalam pendidikan dan proses pembelajaran dapat menjadi motivasi dan meningkatkan prestasi anak. Orang tua merupakan bagian dari proses pendidikan. Keterlibatan orang tua merupakan suatu proses dimana orang tua menggunakan segala kemampuan mereka untuk memberikan mafaat kepada diri sendiri, anak, dan program yang dijalankan oleh anak.<sup>86</sup> Pendapat Morrison menjelaskan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam proses pendidikan memberikan manfaat kepada orang tua, anak, serta pelaksanaan program. Peran serta orang tua dapat memberikan motivasi pada anak, guru, dan pengambil kebijakan.

---

<sup>86</sup> George S. Morisson, op. cit., h. 274

*Parents may participate in the school in several ways. They may sit on policy-making committees, play a supportive role, act as aides in the classroom, or be trained as teachers of their own children at home.*<sup>87</sup> Orang tua dapat berpartisipasi di sekolah dengan menjadi komite pengawas sekolah, ikut terlibat aktif dalam kegiatan, membantu kegiatan di kelas, serta menjadi pembimbing dan pendamping anak di rumah. Menurut Catron dan Allen, orang tua dapat berpartisipasi menjadi volunter atau relawan di kelas, sponsor pada kegiatan field trip atau event tertentu, guru tamu dan berbagi pengetahuan tentang topik budaya, hobi, dsb. dengan kegiatan yang menyenangkan, aktif dalam kegiatan proyek, serta berpartisipasi pada kegiatan akhir pekan.<sup>88</sup> Pendapat tersebut menjabarkan bahwa orang tua dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di kelas maupun di luar kelas.

Orang tua dapat ikut serta dalam mengecek perkembangan anak yang dapat dilihat dari talenta individu anak meliputi *self control, intra-communication dan inter communication*.<sup>89</sup> Peran serta orang tua dalam melaksanakan pendidikan inklusi dapat dibangun dengan komunikasi yang baik oleh pihak sekolah. Keterlibatan orang tua untuk bekerja sama menyatukan tujuan pendidikan bagi anak menjadi sangat penting dalam

---

<sup>87</sup> Phyllis Click and Kimberly A. Karkos, *Administration of Programs for Young Children Seventh Edition* (Australia: Thomson, 2008), P. 401.

<sup>88</sup> Carol E. Catron and Jan Allen, *Early Childhood Curriculum "A Creative Play Model" Second Edition* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1999), p. 78.

<sup>89</sup> Mudjito, dkk, op. cit., h. 79.

menyusunan program, sehingga kegiatan di sekolah dapat di dukung atau di aplikasikan di rumah. Keluarga juga menjadi konteks sosial bagi anak untuk belajar, selain di sekolah. Oleh karena itu, komunikasi efektif antara guru dan orang tua dapat membantu dalam mengembangkan potensi dan perkembangan anak. Manfaat Kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua dapat dilakukan dengan kunjungan rumah (*home visit*), laporan harian, raport, parenting, dsb. Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua harus berperan aktif dalam program sekolah baik dalam kegiatan di kelas, kegiatan akhir tahun, maupun kegiatan sekolah lainnya sehingga terjalin kerjasama antara sekolah dan orang tua sehingga orang tua dapat mendampingi perkembangan anak.

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabot sekolah yang berperan dalam proses pembelajaran. Manajemen sarana prasarana, meliputi: (1) penentuan kebutuhan; (2) proses pengadaan; (3) pemakaian; dan (4) pencatatan atau pengurusan.<sup>90</sup> Dalam mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas harus melihat kekayaan yang ada dan menentukan sarana sesuai kebutuhan dan kepentingan pendidikan di sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan biaya dari pemerintah, SPP,

---

<sup>90</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Diva Press, 2009), h. 99-100.

BP3 atau komite sekolah, dan bantuan dari masyarakat. Setiap pemakaian atau penggunaan sarana prasarana harus ada inventaris (pemeliharaan barang) dan harus dipertanggung jawabkan. Dari segi pemakaian alat perlengkapan dibedakan menjadi dua, yaitu: barang tidak abis pakai dan barang habis pakai yang harus digunakan secara maksimal.

Keperluan inventaris sarana prasarana dapat dilakukan dengan instrumen administrasi berupa buku inventaris, pembelian, penghapusan, kartu barang, dan pertanggungjawaban. Standar sarana dan prasarana diatur di dalam pasal 42 ayat 1 dan 2, PP Nomor 19 tahun 2005 ayat 1 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran.<sup>91</sup> Sedangkan ayat 2 menjelaskan bahwa prasarana yang wajib dimiliki oleh satuan pendidikan adalah lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, kantin, tempat olahraga, tempat bermain, tempat beribadah, dan ruang lain yang menunjang proses pembelajaran.

Pada sekolah inklusi sarana prasarana dan semua fasilitas harus mempunyai aksesibilitas yang mudah, aman, dan aman bagi semua anak baik anak normal maupun anak berkebutuhan, sehingga bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat mengakses fasilitas secara mandiri tanpa

---

<sup>91</sup> Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005

harus membutuhkan bantuan dari orang lain dan tidak mengalami kesulitan. Sarana dan prasarana pada sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi harus ramah anak, aksesibilitas, dan mobilitas baik fasilitas sekolah maupun media pembelajaran sehingga memudahkan anak yang memiliki kebutuhan khusus maupun anak normal untuk dapat dengan mudah menggunakan seluruh sarana prasarana yang ada di sekolah dengan mandiri. Standar sarana dan prasarana meliputi prinsip PAUD yaitu aman, nyaman, terang, memenuhi kriteria kesehatan anak, sesuai tahapan dan usia anak serta memanfaatkan potensi lingkungan, sedangkan persyaratan meliputi luas lahan, ruang untuk anak bermain baik dalam maupun halaman, APE yang mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, keaksaraan.

Pelaksanaan proses pendidikan tidak terlepas dari penataan lingkungan yang meliputi lingkungan kelas dan luar kelas. Lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, meliputi: (1) lokasi, pilih lokasi yang mempunyai kondisi alami; (2) keamanan interen; (3) desain, lingkungan belajar dirancang dengan memperhatikan tujuan, tata letak, bentuk, dan warna sehingga nyaman untuk belajar; dan (4) fasilitas.<sup>92</sup> Dalam proses pembelajaran lingkungan berperan sangat penting, sehingga penataan lingkungan, pemilihan tempat, keamanan dan

---

<sup>92</sup> Partini, *Pengantar Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2010), h. 53-54.

kenyamanan, sarana prasarana serta desain penataan lingkungan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga anak dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara optimal dan tujuan pembelajaran akan tercapai. Lingkungan pembelajaran perlu diadaptasi bagi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus.

Pengaturan lingkungan bermain sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Di kelas inklusi penempatan posisi perabot dan sumber belajar harus jelas sehingga memudahkan anak untuk bergerak. Materi yang digunakan di kelas inklusi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: (1) segi keamanan; (2) sesuai kondisi dan tahap perkembangan anak; (3) kualitas barang yang digunakan; (4) dapat memenuhi berbagai tujuan bermain dan belajar; (5) mudah ditata dan dipindahkan agar ruangan menjadi dinamis; serta (6) keseimbangan.<sup>93</sup> Penyusunan ruangan memerlukan perencanaan untuk setiap individu dan kelompok anak, memahami pengalaman anak sebelumnya, mengetahui perkembangan anak, serta mendukung pembentukan kepercayaan, kemandirian dan kreativitas anak. berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana dalam melaksanakan pendidikan inklusi harus aman, nyaman, ramah, dan aksesibilitas bagi anak pada umumnya dan ABK pada khususnya, meliputi bangunan, ruangan, media dan sumber pendidikan.

---

<sup>93</sup> Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, *op. cit.*, h. 232.

### c. Pengelolaan Keuangan

Keuangan menjadi salah satu komponen dalam pendidikan. Manajemen keuangan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pendidikan. Menurut Supriadi, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan (di sekolah).<sup>94</sup> Supardi menjelaskan bahwa pembiayaan menjadi komponen penting dalam menyelenggarakan pendidikan karena keuangan menjadi faktor penentu terlaksananya proses pendidikan. Menurut Tilaar biaya merupakan keseluruhan dana dan upaya yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan dalam kenyataannya bahwa pendidikan merupakan bentuk dari pelayanan masyarakat.<sup>95</sup> Menurut Tilaar biaya adalah berupa dana dan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan. Biaya sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu pelayanan masyarakat.

Menurut Chon, biaya pendidikan meliputi: biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).<sup>96</sup> Biaya pendidikan langsung adalah biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, sedangkan biaya tidak langsung

---

<sup>94</sup> Supriadi dalam Maisah, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Referensi, 2013), h. 99.

<sup>95</sup> Tilaar dalam Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), h. 75.

<sup>96</sup> Chon dalam Maisah, *op. cit.*, h. 102.

berupa keuntungan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Sumber keuangan pendidikan berasal dari anggaran negara yang meliputi: anggaran rutin dan pembangunan serta dana masyarakat seperti: SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), iuran BP3 atau komite sekolah, bantuan atau hibah, dan hasil usaha yang sah menurut aturan yang ada.<sup>97</sup> Anggaran pendidikan yang digunakan untuk operasional sekolah berasal dari anggaran rutin dan pembangunan dari pemerintah juga dari dana masyarakat. Pengelolaan keuangan disuatu lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar.

*A budget is a statement of goals for one year stated in financial terms.*<sup>98</sup> Keuangan merupakan rencana pembiayaan program selama satu tahun. Kegiatan manajemen keuangan pada lembaga pendidikan meliputi: (1) perencanaan anggaran tahunan; (2) pengadaan anggaran; (3) pendistribusian anggaran; (4) pelaksanaan anggaran; (5) pembukuan keuangan; serta (6) pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.<sup>99</sup> Perencanaan tahunan merupakan penyusunan anggaran keuangan dan realitas mengenai perencanaan pendapatan dan pembelanjaan selama satu tahun yang akan datang. Semua pendidikan yang akan dilaksanakan selama satu tahun dianggarkan berdasarkan kebutuhan pembiayaan secara nyata

---

<sup>97</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *op. cit.*, h. 100.

<sup>98</sup> Phyllis Click and Kimberly A. Karkos, *op. cit.*, p. 287.

<sup>99</sup> Ibrahim Bafadal, *Dasar-Dasar Manajemen dan Supervisi Taman Kanak-Kanak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 47.



pada setiap program. Perencanaan pendapatan menyusun dan memperkirakan sumber keuangan yang dapat digunakan untuk pembiayaan program. Contoh sumber keuangan yaitu uang SPP, bantuan dari pemerintah, donatur, hasil usaha, dan sebagainya. Perencanaan pembelanjaan disusun dengan mempertimbangkan keperluan program pembelajaran, pemeliharaan dan pengadaan fasilitas sekolah, serta gaji guru harus direncanakan sesuai kebutuhan.

Pengadaan anggaran merupakan usaha untuk mendapatkan pemasukan dari sumber-sumber keuangan. Pengadaan anggaran dapat dilakukan dengan mengajukan kerjasama dengan pihak terkait, merealisasikan program wirausaha, permohonan bantuan kepada pemerintah, orang tua wali murid, yayasan, dan dinas sosial. Pendistribusian anggaran dilakukan dengan menyalurkan anggaran ke unit-unit tertentu sesuai perencanaannya, seperti: kebutuhan setiap kelas, UKS (unit kesehatan sekolah), dan sebagainya. Tahap pelaksanaan anggaran semua unit atau personel sekolah menggunakan semua anggaran yang sudah didistribusikan untuk melaksanakan program sesuai rencana anggaran. Pembukuan keuangan berfungsi untuk mencatat secara teratur perubahan-perubahan semua pengeluaran dan pemasukan beserta buktinya. Pembukuan keuangan meliputi: penyusunan draf anggaran, pembukuan kas, pendokumentasian bukti penerimaan dan pengeluaran berupa surat tanda bukti berbentuk kuintasi dan faktur.

Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan dengan memeriksa anggaran yang sudah terlaksana sesuai atau tidak. Pengawasan ada dua macam, yaitu: (1) pengawasan fungsional, dilakukan oleh pihak-pihak tertentu; dan (2) pengawasan melekat yang dilakukan oleh lembaga itu sendiri (sekolah).<sup>100</sup> Dalam proses pengawasan keuangan, pengawas memberikan nilai dan evaluasi tentang manajemen keuangan. Pasal 62 ayat 1 PP Nomor 19 tahun 2005 menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Pembiayaan tersebut meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja. Berbagai pendapat diatas disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan, dan mengawasan yang digunakan untuk pelayanan pendidikan.

## **2. Kurikulum Pendidikan Inklusi**

Kurikulum sering digunakan dalam bidang pendidikan. Kurikulum menjadi acuan dalam memberikan materi atau melaksanakan kegiatan. Kurikulum mencakup berbagai komponen yang digunakan dalam pembelajaran dan memuat berbagai tujuan pendidikan secara umum dan pembelajaran secara khusus. *Curriculum that is developed around a central theme promotes young children's thinking, especially their formulation of*

---

<sup>100</sup> Ibid, h. 53.

*konseptual thought*.<sup>101</sup> Pendapat di atas menjelaskan bahwa kurikulum merupakan pusat tema yang mengembangkan sekitar dengan memperhatikan ide atau pemikiran anak yang menjadi bahan spesial dalam membangun konsep anak. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>102</sup> Kurikulum menjadi standar pedoman rencana dan pengaturan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi tujuan, isi, dan bahan ajar.

Kurikulum sebagai perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode pendidikan dan jenjang tertentu.<sup>103</sup> Kurikulum merupakan perangkatan pembelajaran yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik disetiap jenjang pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran mengenai tujuan, isi, bahan dan metode yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara luas kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat bahan atau isi dan rencana

---

<sup>101</sup> Ellen R. Daniels and Kay Stafford, *Creating Inclusive Classrooms* (Washington D.C., Children's Resources International, Inc., 2002), p. 115

<sup>102</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *op. cit.*, h. 145.

<sup>103</sup> Partini, *op. cit.*, h. 46-47.

pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, proses, serta evaluasi; semua pengalaman yang diperoleh siswa; berupa acuan, rujukan atau rambu-rambu pembelajaran yang disampaikan dalam proses pembelajaran untuk membantu mengembangkan potensi siswa sehingga tercapai tujuan pendidikan.

Komponen kurikulum meliputi tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Tujuan merupakan keadaan yang ingin dicapai meliputi seluruh aspek perkembangan dan potensi anak. Isi adalah materi atau substansi yang harus didapat oleh siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses merupakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan tujuan. Kurikulum pendidikan anak usia dini menekankan tentang bagaimana menstimulasi setiap aspek perkembangan anak. Kurikulum pendidikan anak usia dini didasarkan pada teori perkembangan, kebutuhan, dan usia anak. Kurikulum ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Didalam kurikulum pendidikan anak usia dini terdapat empat kelompok standar PAUD, yaitu: (1) standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) Standar pendidik dan tenaga pendidik; (3) Standar isi, proses dan penilaian; (4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan.

Kurikulum pendidikan anak usia dini harus terpadu, terintegrasi, terbuka dan inklusif. Kurikulum yang terpadu berarti sebuah kurikulum harus

mendorong anak-anak untuk dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan semua aspek perkembangan. Kurikulum yang terintegrasi dapat membantu anak-anak membangun hubungan yang bermakna, menerima informasi baru, sehingga memungkinkan anak-anak untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sebuah kurikulum juga harus terbuka, maksudnya sebuah kurikulum selalu terbuka untuk menerima hal-hal baru diluar perencanaan. Sedangkan kurikulum inklusif menekankan pentingnya perbedaan individu, agama, status ekonomi dan keragaman budaya. Di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan kurikulum untuk pendidikan anak usia dini pada tahun 2010.

Kurikulum harus mengakomodasi seluruh anak baik anak normal maupun anak yang memiliki hambatan. Pada dasarnya kurikulum harus mengakomodasi partisipasi di dalam kelas saat pembelajaran, mengakomodasi semua program sekolah baik dalam pembelajaran maupun kegiatan yang lain, serta kurikulum harus sesuai dengan anak. Kurikulum harus mempertimbangkan perkembangan, usia, dan kebutuhan setiap anak. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang terintegrasi yang bersifat fleksibel. Menurut Jackman, kurikulum juga menjabarkan pentingnya menyisipkan tentang keberagaman atau anti bias.<sup>104</sup> Kurikulum anti bias

---

<sup>104</sup> Hilda L. Jackman, *Early Education Curriculum, A Child's Connection To The World*, Fourth Edition (USA: Thomson Delmar Learning, 2009), h.44.

merupakan kurikulum komprehensif yang menawarkan pedoman, kegiatan, bahan dan menciptakan lingkungan pendidikan awal yang kaya untuk menilai perbedaan dan persamaan. Menyisipkan tentang gender, budaya, ras atau etnis yang berbeda dalam kurikulum dapat menawarkan kesempatan untuk mengembangkan wawasan baru pada guru dan anak-anak. Kurikulum anti bias dikembangkan untuk mengajar semua anak yang berbeda baik bahasa, fisik, ras, agama, bangsa, budaya, atau dengan kebutuhan khusus. Sebuah kurikulum anti bias perlu memasukan beberapa komponen, yaitu: budaya, kebutuhan khusus dan lingkungan.

Pengalaman belajar membantu anak memperluas pengalaman belajar mengembangkan nilai, rasa hormat dan rasa memiliki budaya. Pada pendidikan inklusi, sekolah menerima dan menghargai keanekaragaman manusia serta memberikan dukungan yang diperlukan sehingga semua anak dan keluarga mereka dapat berpartisipasi dalam pilihan program. Anak-anak dengan kebutuhan khusus terintegrasi ke dalam aktivitas kelas secara efektif. Kurikulum pada pendidikan anak usia dini terbagi menjadi dua yaitu: *core* (inti) dan *hidden* (tersembunyi). Kurikulum inti direncanakan dan dipersiapkan secara terstruktur sebelum pembelajaran, sedangkan kurikulum yang tersembunyi tidak direncanakan secara terstruktur tetapi muncul secara spontan dalam proses pembelajaran. Prinsip dasar dalam mengembangkan kurikulum adalah bersifat fleksibel dan di sesuaikan dengan kebutuhan anak serta kondisi lingkungan sehingga seluruh aspek perkembangan anak dapat

terstimulasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Berdekamp dan Rosergarant yang menyebutkan:

Ada delapan poin dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini, antara lain: (1) berdasarkan keilmuan PAUD dan penelitian tentang pembelajaran anak usia dini; (2) mengembangkan anak secara menyeluruh pada semua aspek perkembangan; (3) kurikulum harus relevan, menarik, dan menantang peserta didik untuk berani mencoba, berpikir, serta memecahkan masalah; (4) mempertimbangkan kebutuhan anak dan memperhatikan situasi serta kondisi sosial, budaya, ekonomi, dsb.; (5) mengembangkan kecerdasan dan kemampuan berpikir; (6) menyenangkan dan menggunakan konsep bermain sambil belajar; (7) fleksibel; dan (8) bersifat terpadu.<sup>105</sup>

Permendiknas nomor 70 tahun 2009 menjelaskan bahwa satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.<sup>106</sup> Kurikulum pada pendidikan inklusi tidak ada istimewa, karena pada dasarnya kurikulum disusun untuk semua anak. Kurikulum pada setting pendidikan inklusi menggunakan kurikulum reguler seperti: kurikulum KTSP, kurikulum 2004, kurikulum 2013, Permen 58, dan sebagainya. Implementasi kurikulum pada pendidikan inklusi menggunakan pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun model-model pengembangan kurikulum dalam pendidikan inklusi, antara lain: (1) duplikasi, yaitu kurikulum

---

<sup>105</sup> Berdekamp dan Rosergarant dalam Partini, *op. cit.*, h. 47-48.

<sup>106</sup> Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus sama dengan kurikulum umum; (2) modifikasi, yaitu kurikulum umum dirubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus; (3) substitusi, beberapa komponen kurikulum diganti dengan komponen yang setara sesuai kebutuhan ABK; dan (4) Omisi, beberapa komponen dari kurikulum ditiadakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku disekolah umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah yang terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikank husus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.<sup>107</sup>

Pengembangan kurikulum pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini berdasarkan pada DAP (*Developmentally Appropriate Practice*). Menurut NAEYC, ada dua dimensi pokok dalam DAP (*Developmentally Appropriate Practice*), yaitu menekankan pada pendekatan usia dan pendekatan individu. Konten kurikulum harus dapat memfasilitasi pengetahuan anak sesuai dengan tahap usia dan sesuai keunikan setiap

---

<sup>107</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 19.



anak. Prinsip DAP (*Developmentally Appropriate Practice*) meliputi: seluruh aspek perkembangan anak saling terkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi; perkembangan memiliki urutan yang runtut; setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda; pengalaman sebelumnya mempengaruhi perkembangan selanjutnya; proses perkembangan dapat diperkirakan menuju ke arah yang lebih kompleks, terorganisasi dan terinternalisasi; perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial yang beragam serta kematangan secara biologis dan lingkungan; anak sebagai pembelajar aktif; bermain sebagai alat bagi anak dalam menunjukkan tahap perkembangannya; perkembangan anak akan lebih meningkat, jika anak diberikan kesempatan; anak memiliki beragam cara untuk belajar, mencari tahu serta menunjukkan apa yang diketahuinya; anak akan lebih mudah belajar jika anak merasa merasa aman dan nyaman.

*DAP (Developmentally Appropriate Practice) developing a program that (1) meets the needs of all the children in your classroom; (2) falls within the guidelines of your current workplace; (3) follows the dictates of both state and federal laws; and (4) fits your personal philosophy and beliefs is a difficult task at best.*<sup>108</sup> Prinsip pengembangan program berdasarkan DAP, yaitu semua anak di kelas membutuhkan hadiah sebagai motivasi, guru mengurangi memberikan soal tetapi menciptakan suasana pembelajaran

---

<sup>108</sup> Penny Low Deiner, *Inclusive Early Childhood Education Development, Resources and practice* (Australia: Wadsworth, 2013), p. 83.

yang menyenangkan, serta guru menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai peraturan pemerintah. Penerapan DAP dalam kurikulum mempertimbangkan faktor waktu yang digunakan, perbedaan antara elemen yang ada di dalam kurikulum, keseimbangan antara kegiatan yang direncanakan sesuai kurikulum, serta memberikan pengalaman di luar ruangan bagi kurikulum anak usia dini. Kurikulum pada pendidikan inklusi adalah kurikulum terintegrasi. *Integrated curriculum is a term that is often interchanged with or associated with the term thematic curriculum.*<sup>109</sup> Miller menjelaskan kurikulum integrasi berbeda dengan kurikulum tematik.

Kurikulum yang menggunakan pendekatan integratif sering disebut juga dengan pendekatan terpadu. Kurikulum integratif bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan terstruktur.<sup>110</sup> Keseluruhan berarti kurikulum yang digunakan memiliki makna, arti, dan faedah tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan terstruktur berarti setiap bagian kurikulum yang meliputi makna, arti, dan faedah berada dan berfungsi pada suatu struktur pendidikan. Seluruh materi atau bahan maupun komponen dalam pembelajaran harus digabungkan, dipadukan dan menyatukan antar disiplin ilmu. Kurikulum yang terintegrasi adalah kurikulum yang memberikan

---

<sup>109</sup> Regina Miller, *The Developmentally Appropriate Inclusive Classroom in Early Education* (USA: Delamar Publisher, 1996), h. 35.

<sup>110</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 36.

manfaat kepada anak, guru dan orang tua.<sup>111</sup> Kurikulum yang menggunakan pendekatan integratif tidak hanya ditujukan kepada anak tetapi juga kepada guru dan orang tua, sehingga guru, orang tua dan anak dapat merasakan kebermanfaat atau dampak dari kurikulum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Anak akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk belajar dengan menggunakan berbagai pendekatan dan strategi. Melalui kurikulum integrasi guru dapat menciptakan, mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum dengan menyenangkan dan guru dapat memfasilitasi semua kebutuhan anak di kelas. Sedangkan orang tua bisa mendapatkan informasi tentang sekolah, kegiatan pembelajaran, serta orang tua dapat terlibat dalam kegiatan. Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program pendidikan inklusi harus menggunakan kurikulum integrasi dan kurikulum dikembangkan sesuai dengan DAP sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap anak, memberikan informasi kepada orang tua, dan guru dapat memfasilitasi semua anak.

### **3. Asesment dan Tindak Lanjut**

Asesmen dan tindak lanjut pada pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan mengobservasi, memberikan penilaian, dan memberikan penanganan. Asesmen adalah kegiatan yang dilakukan untuk

---

<sup>111</sup> Regina Miller, *op. cit.*, h. 3-4.

menghimpun informasi yang komprehensif dan akurat pada individu berisiko yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam melakukan tindak lanjut dengan merencanakan program layanan bantuan.<sup>112</sup> Hasil penilaian berupa capaian perkembangan, hambatan, bakat dan minat sebagai dasar pertimbangan dalam merencanakan program untuk memenuhi kebutuhan setiap anak. Asesmen harus dilaksanakan secara detail dengan berbagai metode. Asesmen dapat memberikan informasi tentang anak menggambarkan berbagai karakter termasuk siapa yang tinggal dengan anak, karakter anak, kebutuhan anak, dan sebagainya.

Informasi tentang data anak dapat diperoleh dengan berbagai jenis asesmen, antara lain: catatan deskripsi (*descriptive records*); catatan anekdot atau naratif (*anecdotal, or narrative, record*); diagram, gambar, dan foto (*diagrams, drawings, and photographs*); *audiotapes and videotapes*; *checklists*; *frequency counts*; *times samples*; *rating scales*; *criterion-referenced measures (charts of normal development)*; dan *norm-references tests*.<sup>113</sup> Beberapa jenis asesmen tersebut dapat digunakan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan awal anak saat masuk sekolah. *Assesment strategies may be used for diagnosis. Just as a medical doctor conducts a physical examination of a child to diagnose an illness, psychologists, teachers,*

---

<sup>112</sup> Riana Bagaskorowati, *Anak Berisiko: Identifikasi, Asesmen, dan Tindak lanjut Dini* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 68.

<sup>113</sup> Ellen R. Daniels and Kay Stafford, *Creating Inclusive Classrooms* (Washington, DC: Children's Resources International, Inc., 2002), p. 49-56.

*and other adults work with children can conduct an informal assesment to diagnose a developmental delay or identify cause for poor performance in learning.*<sup>114</sup> Pendapat di atas menjelaskan bahwa asesmen merupakan strategi yang digunakan oleh dokter, guru, psikolog, dan orang tua untuk mendiagnosa keterlambatan perkembangan dalam pembelajaran. *This step in the assessment process is also called preassessment, because the teacher is conducting assessment prior to planning curriculum based on individual needs.*<sup>115</sup> Asesmen awal merupakan proses atau tahapan asesmen yang dilakukan guru pada awal sebelum pembelajaran yang digunakan untuk membuat perencanaan kurikulum atau pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan setiap anak.

Asesmen input merupakan salah satu kegiatan intervensi dini. Menurut Allen mengatakan semua yang peduli tentang mewujudkan potensi bayi kita, anak-anak dan orang-orang muda perlu bekerja sama dan mengambil langkah untuk sebuah budaya intervensi jangka panjang di Inggris.<sup>116</sup> Kegiatan intervensi harus dilakukan sejak awal pada anak dan semua orang harus saling bekerja sama dalam mengambil langkah atau program jangka panjang maupun pendek untuk mewujudkan potensi anak.

---

<sup>114</sup> Sue C. Wortham, *Assessment in Early Childhood Education* (New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall, 2005), p. 2-3.

<sup>115</sup> Ibid, h. 33.

<sup>116</sup> Cathy Nutbrown dan Peter Clough, *Pendidikan Anak Usia Dini* terjemahan Adhya Utami Larasati Pramono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 216.

Tindak lanjut diberikan kepada anak yang mempunyai kebutuhan dalam perkembangan, sistem belajar, budaya, dan sebagainya untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Screening dilakukan oleh guru pada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Screening dilakukan oleh guru dengan melakukan observasi untuk mengetahui masalah perkembangan anak sehingga guru dapat mengetahui fokus kebutuhan anak. *Once information is gathered, a program needs to be developed by a team including in the above instance the teacher and the physical therapist.*<sup>117</sup> Pernyataan di atas menjelaskan bahwa program tindak lanjut bagi anak yang mempunyai kebutuhan khusus harus dilakukan guru dengan bekerja sama dengan terapis.

Penangan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam satu tim *works*, yaitu pendidik, orang tua, guru pembimbing khusus, ahli medis, psikologis, pemerintah, dsb. Kerjasama antara sekolah, pendidik, orang tua, masyarakat, tenaga ahli dalam memberikan penanganan anak normal pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus pada khususnya akan membantu menstimulasi perkembangan anak. Penangan anak berkebutuhan khusus pada pendidikan anak usia dini, meliputi: (1) mengenali atau mengidentifikasi masalah anak melalui observasi dan wawancara; (2) prapendidikan (masa percobaan),

---

<sup>117</sup> Bernard Spodek, Olivia N. Saracho, dan and Michael D. Davis, *Foundations of Early Childhood Education* (USA: Allyn and Bacon, 1991), p. 177.

asesmen, *case conference*; (3) perancangan program pendidikan; serta (4) pelaksanaan program (*pull-out treatment*), evaluasi hasil belajar, dan tindak lanjut (*follow up*).<sup>118</sup>

Mengenali permasalahan anak berkebutuhan khusus dapat dimulai dengan mempelajari rekam jejak. Rekam jejak diperoleh dari pemeriksaan medis, seperti: ahli medis (dokter), tumbuh kembang (psikolog). Hasil rekam jejak menjadi acuan bagi sekolah dan pendidik untuk mengobservasi kebutuhan anak. Selain observasi pada anak, sekolah dan pendidik melakukan wawancara tentang perkembangan, kebiasaan, kegiatan dirumah, terapi atau pengobatan yang dilakukan anak kepada orang tua. Masa percobaan digunakan untuk mendapatkan data tentang anak secara menyeluruh untuk melengkapi diagnosa sementara sebelum menyusun program pendidikan sesuai kebutuhan anak dengan masa percobaan 1-3 bulan. Hasil dari rekam jejak, wawancara, dan observasi dibuat asesmen dengan menganalisis kebutuhan, program, penanganan yang sesuai dengan mendiskusikan bersama orang tua, guru, dan ahli. Penyusunan program disesuaikan dengan kebutuhan anak. Penyusunan program berupa penyusunan program reguler dan individu. Program dilaksanagn di kelas dalam proses pembelajaran dengan memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak. Berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan asesmen input dilakukan sebagai dasar untuk melakukan

---

<sup>118</sup> Masnipal, *op. cit.*, h. 325

tidak lanjut kepada untuk menangani atau menstimulasi perkembangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan rekam medis.

#### **4. Pembelajaran**

Pendidikan merupakan satu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang dapat menggerakkan sistem tersebut. Pembelajaran tidak lepas dari kurikulum sebagai acuan pembelajaran. Prinsip pembelajaran anak usia dini di kelas inklusi meliputi: berorientasi pada kebutuhan anak, bermain sambil belajar, kreatif dan inovatif, mengembangkan keterampilan hidup, berorientasi pada perkembangan anak, memperhatikan perbedaan individu, serta menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran. Pembelajaran pendidikan inklusi pada anak usia dini memiliki beberapa komponen, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

##### **a. Perencanaan Pembelajaran**

Guru harus mempunyai keterampilan dan strategi dalam merancang pembelajaran sehingga dapat memfasilitasi semua anak. Rencana pembelajaran merupakan panduan kerja guru yang disusun secara terencana sebagai acuan kegiatan untuk menyampaikan materi atau indikator yang dipilih dengan metode pembelajaran yang diorganisasikan ke dalam serangkaian kegiatan.<sup>119</sup> Rencana pembelajaran diperlukan guru sebagai acuan dalam membuat dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran

---

<sup>119</sup> Mukhtar Latif, dkk, op. cit., h. 86.



bersifat fleksibel. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan tertentu tentang perubahan tingkah laku peserta didik setelah melalui kegiatan pembelajaran dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran.<sup>120</sup> Aplikasi perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu membuat perangkat pembelajaran baik rencana tertulis, media, penataan lingkungan, dsb.

Perencanaan pembelajaran melibatkan serangkaian pilihan berdasarkan tahap perkembangan, gaya belajar, minat anak-anak, tujuan dan sasaran program, ketersediaan bahan, perlengkapan serta sumber daya. Rothwell dan Kazanas menjelaskan bahwa merumuskan desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi organisasi.<sup>121</sup> Desain pembelajaran sangat diperlukan oleh seorang guru karena dapat membantu kinerja guru dalam mengembangkan materi dan melaksanakan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi: (1) perencanaan mentransformasikan waktu dan materi kurikulum menjadi kegiatan, guru terlibat dalam perencanaan tahunan, semesteran, mingguan, dan harian; (3) perencanaan bersifat fleksibel; (4) menggunakan berbagai model dan metode yang

---

<sup>120</sup> Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, Op., Cit, h. 168.

<sup>121</sup> Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6.

efektif.<sup>122</sup> Menurut Harjanto perencanaan pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu: (1) perencanaan makro, yaitu perencanaan pembelajaran satu tahun; (2) perencanaan meso merupakan perencanaan satu semester; dan (3) perencanaan mikro adalah perencanaan pembelajaran harian.<sup>123</sup> Rencana pembelajaran terdiri dari rencana tahunan, rencana semester, rencana mingguan, rencana harian, rencana individu yang di dalamnya mentransformasikan waktu, materi, dan metode yang bersifat fleksibel. Dalam perencanaan pembelajaran guru menggambarkan aktivitas, tujuan, konsep, keterampilan, ruang dan bahan yang dibutuhkan.

*Planning for children with special need may also require teacher to think of ways to challenge learners for whom certain activities are not appropriate. Just as adaptations for some learners will require activities that are appropriate for their more advanced abilities. An integrated, thematic curriculum can be easily adapted for all learners because they don't all have to do all the possible activities.*<sup>124</sup>

Perencanaan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, guru harus memikirkan kemampuan belajar anak untuk melakukan aktivitas. Guru harus mengadaptasi kegiatan pembelajaran dengan berbagai pendekatan agar sesuai dengan kebutuhan anak. Kurikulum integrasi dan tematik merupakan adaptasi untuk semua anak karena anak tidak harus melakukan semua kegiatan. Guru hanya melihat kebutuhan dan ketercapaian

---

<sup>122</sup> Anita Woolfolk, *Education Psychology Aktive Learning* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 347.

<sup>123</sup> Luluk Asmawati, Op., Cit, h. 3.

<sup>124</sup> Jo Ann Brewer, *Early Childhood Education* (USA: Person, 2007), p. 135.

perkembangan anak. berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran pada pendidikan inklusi dilakukan dengan rencana mingguan, harian dan invidu dengan mengembangkan kurikulum yang berdasarkan pada tahap perkembangan, usia, kebutuhan, dan berbagai pendekatan yang diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran.

### **b. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pengelolaan kegiatan pembelajaran dilakukan secara individu, kelompok kecil, dan kelompok besar yang meliputi pembukaan , inti, penutup yang merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran.<sup>125</sup> Sedangkan Jackman membagi pelaksanaan pembelajaran menjadi empat, yaitu: pembukaan, inti, transisi, dan penutup.<sup>126</sup> Kegiatan pembukaan dimulai dengan penyambutan anak. Kegiatan pembukaan terdiri dari kegiatan fisik motorik dan cerita. Kegiatan pembukaan bertujuan untuk memindahkan fokus anak dari rumah ke sekolah. Kegiatan inti merupakan proses untuk mencapai indikator yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan partisipatif. Kegiatan inti dilakukan melalui proses eksplorasi, eksperimen, elaborasi dan konfirmasi. Kegiatan inti dapat dilakukan di area, sudut, sentra maupun di halaman. Transisi adalah kegiatan atau pengalaman

---

<sup>125</sup> Dijen PAUDNI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TK dan KB* (Jakarta: Depdinas, 2012), h. 34.

<sup>126</sup> Hilda L. Jackman, *Early Education Curriculum, A Child's Connection To The World*, Fourth Edition (USA: Thomson Delmar Learning, 2009), p. 108

belajar anak yang bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas. Guru berinisiatif untuk kegiatan yang diarahkan, dari kegiatan yang aktif dengan aktivitas yang tenang atau dari tenang untuk bermain aktif, pembersihan dan toileting untuk waktu makan snack, makan siang untuk tidur siang, luar ke dalam atau di dalam untuk bermain di luar. Transisi dapat digunakan untuk membantu anak menyesuaikan diri ketika tiba dan kemudian berpisah dari ayah atau ibu, belajar mendengarkan, duduk dan bergabung dalam kegiatan kelompok kecil untuk waktu yang singkat. Anak-anak bebas memilih kegiatan bermain dan mereka akan mengembangkan transisi alami sebagai kepentingan dan rasa ingin tahu anak. Membantu anak-anak bergerak menuju kegiatan penutup. Kegiatan penutup digunakan untuk mengakhiri proses pembelajaran. Kegiatan penutup berfungsi untuk mengulang informasi yang sudah diperoleh anak selama proses pembelajaran dan menekankan nilai-nilai pada anak. Guru mengisi kegiatan penutup dengan bercerita, bernyanyi, bermain, bercakap-cakap, dsb

Pembelajaran pada pendidikan inklusi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar, kebutuhan dan perkembangan anak. Dalam proses pembelajaran, seluruh media dan sumber belajar harus dimodifikasi sesuai dengan karakteristik belajar, kebutuhan, dan perkembangan anak. Pembelajaran di kelas inklusi melibatkan anak normal sebagai tutor bagi anak yang berkebutuhan. Materi yang diberikan sama, tetapi capaian tujuan yang dicapai setiap anak sesuai

dengan kemampuan anak. Proses pembelajaran pada pendidikan inklusi harus fleksibel dan melibatkan anak. Fleksibel berarti proses pembelajaran tidak kaku harus sesuai dengan perencanaan tapi dapat berubah sesuai dengan kebutuhan di lapangan (kebutuhan anak dalam proses pembelajaran). Sedangkan, pembelajaran yang melibatkan anak adalah kegiatan pembelajaran beragam dengan menggunakan berbagai macam strategi dan metode secara bergantian, sehingga selama proses pembelajaran siswa atau anak berpartisipasi aktif baik secara individu maupun kelompok.

Prinsip program keberpusatan pada anak pada kelas inklusi yang demokrasi. Anak-anak dapat menjadi pembelajar aktif, antusias, dan mandiri jika sebagai pendidik mereka kita menghargai budaya dan komunitas mereka dan memahami bagaimana rasisme dan ketidak setaraan sosial lainnya mempengaruhi kehidupan mereka.<sup>127</sup> Pada pembelajaran di kelas inklusi, seorang guru harus menghargai budaya, komunitas, ras, dan ketidak setaraan setiap anak untuk menciptakan anak sebagai pembelajar aktif, antusias, dan mandiri. *These beliefs include the following: (1) individualize school experiences for each child; (2) provide children with opportunities for making good choices that encourage further learning; (3) engage children in active learning; (4) form relationships with families and encourage their direct*

---

<sup>127</sup> Cathy Nutbrown dan Peter Clough, Op., Cit, h. 279.

*involvement in their child's education*.<sup>128</sup> Strategi pembelajaran pada kelas inklusi harus berdasarkan pada *developmentally appropriate practice*, pembelajaran berpusat pada anak, demokrasi, melibatkan orang tua atau keluarga.

Lombardi menjelaskan model pengajaran pada kelas inklusi, yaitu: (1) pengajaran langsung (*direct intrucision*); (2) tindak lanjut strategi (*strategy intervention*); (3) tim asisteni-guru (*teacher-assistance team*); serta (4) model guru sebagai konsultan (*consulting teacher model*).<sup>129</sup> Pendapat Lombardi menjelaskan bahwa pembelajaran di kelas inklusi harus menekankan pada penggunaan struktur yang ringan dan jadwal waktu kelas, menggunakan seluruh sumber daya guru secara efisien (baik pendidikan umum maupun khusus di kelas reguler, serta pemantauan kemajuan secara seksama, menekankan pada kemampuan pengajaran, guru reguler dan guru pendidikan khusus bekerja dalam tim untuk mengatasi masalah serta memberikan bantuan pada anak; serta guru pendidikan khusus dilatih untuk menjadi konsultan bagi guru reguler.

Aktivitas yang mendorong anak untuk belajar aktif dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan metode mengajar dari anak kepada anak, yang meliputi: (1) mengembangkan materi pengajaran dan pembelajaran yang mengupas masalah-masalah kecacatan dan inklusi; (2) menelaah peranan kerja kelompok untuk mendukung inklusi di kelas; (3) mengembangkan tes asesmen sederhana yang dapat dipergunakan oleh anak dan guru di rumah dan di

---

<sup>128</sup> Penny Low Deiner, *op. cit.*, p. 5.

<sup>129</sup> Lombardi dalam J. David Smith, *op. cit.*, h. 401.

masyarakat; serta (4) memasang anak penyandang cacat dan non cacat, sehingga dapat bekerjasama untuk saling mendukung di sekolah dan masyarakat untuk mempromosikan inklusi.<sup>130</sup>

Guru pendidikan inklusi harus menggunakan berbagai metode dan strategi dalam pembelajaran untuk mendorong semua anak belajar aktif. Beberapa metode yang bisa diterapkan dan menjadi skill seorang guru adalah dengan mengembangkan materi pengajaran tidak hanya berdasarkan indikator dan materi yang ada pada kurikulum tapi dikembangkan lebih luas sesuai kebutuhan anak dan mengembangkan asesmen secara sederhana sebagai alat penilaian yang dapat digunakan oleh anak, guru, orang tua, masyarakat dengan mudah. Dalam proses pembelajaran guru memanfaatkan kerja kelompok dengan memasang anak yang memiliki kebutuhan dengan anak normal, sehingga terjadi interaksi sosial dan saling mendukung atau membantu anak yang memiliki kebutuhan.

Prinsip-prinsip pembelajaran pada pendidikan inklusi, meliputi: (1) prinsip motivasi, (2) prinsip latar atau konteks; (3) prinsip keterarahan; (4) prinsip hubungan sosial; (5) prinsip belajar sambil bekerja; (6) prinsip individualisasi; (7) prinsip menemukan; dan (8) prinsip pemecahan masalah.<sup>131</sup> Seorang guru harus memberikan motivasi agar anak memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru harus

---

<sup>130</sup> Paul Mumba. "Zumbia-Mendorong Siswa Aktif" *buletin EENET no. 3*. [www.eenet.org.uk](http://www.eenet.org.uk) (diakses 13 Januari 2015).

<sup>131</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 24-25.

mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang tidak perlu bagi anak. Setiap kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Dalam pembelajaran, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah.

Guru memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan, menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Guru juga perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan menyerap materi, kecepatan dalam belajar dan perilakunya, sehingga setiap anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Guru mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlibat aktif, baik fisik, mental, sosial, dan emosional. Dalam pembelajaran guru mengajukan berbagai persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar dan anak merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkan masalah sesuai dengan kemampuannya anak. Berbagai penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi dilakukan



dalam 4 sesi, yaitu: pembukaan, inti, istirahat, penutup yang dilakukan penuh demokrasi.

### **c. Penilaian Pembelajaran**

Penilaian dalam proses pembelajaran dilakukan pada anak sebagai perangkat evaluasi program pembelajaran. Penilaian adalah proses mengamati, merekam dan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan anak dan bagaimana mereka melakukannya.<sup>132</sup> Penilaian bertujuan untuk merancang kegiatan kurikulum bagi anak-anak yang akan mendorong pertumbuhan dan keberhasilan anak di ruang kelas.<sup>133</sup> Penilaian dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan, pertumbuhan dan pembelajaran. Penilaian berhubungan dengan tujuan dan sasaran program. Penilaian mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan penting tentang kebutuhan perkembangan dan pendidikan anak. Dengan penilaian dapat memberikan intruksi dan kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan yang sesuai dengan masing-masing anak.

Proses penilaian pada anak usia dini meliputi: asesmen awal, penilaian selama proses pembelajaran, laporan penilaian diakhir periode, dan laporan penilaian diakhir tahun.<sup>134</sup> Proses penilaian tersebut harus dilakukan

---

<sup>132</sup> Hilda L. Jackman, op. cit., p. 80.

<sup>133</sup> Janice J. Beaty, *Observasi Perkembangan Anak Usia Dini* terjemahan Arif rakhman (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 16.

<sup>134</sup> Sue C. Wortham, Op., Cit, p. 32-33.

oleh guru secara urut dari penilaian awal sebagai identifikasi kebutuhan anak, selama proses pembelajaran, dan laporan akhir. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi perkembangan anak secara optimal. Dalam melakukan penilaian pada anak usia dini harus mempertimbangkan beberapa prinsip penilaian, yaitu: (1) holistik, penilaian dilakukan pada semua aspek perkembangan; (2) autentik, penilaian dapat menggambarkan kondisi anak sesungguhnya; (3) kontinu, penilaian dilakukan terus menerus dan setiap saat; (4) individual, penilaian dilakukan dengan melihat perkembangan setiap anak; serta (5) multisumber dan multikonteks, penilaian dilakukan secara terpadu dari berbagai sumber dan konteks penilaian.<sup>135</sup> Prinsip penilaian tersebut harus dilaksanakan untuk mengidentifikasi perkembangan anak.

Penilaian pada anak prasekolah juga dilakukan menggunakan teknik alternatif yang melibatkan pengamatan anak, mengumpulkan karya representatif di penilaian berdasarkan permainan, wawancara anak, dan dokumentasi visual.<sup>136</sup> Penilaian pada anak prasekolah dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi visual, berdasarkan permainan, dan mengumpulkan karya anak. Dokumentasi visual dapat berupa foto, rekaman video, rekaman suara, maupun panel dokumentasi yaitu menggabungkan beberapa teknik penilaian. Kegiatan penilaian meliputi pengamatan (*observing*), pencatatan (*recording*),

---

<sup>135</sup> Slamet Suyanto, Op., Cit, h. 189-191.

<sup>136</sup> Janice J. Beaty, Op., Cit, h. 15.

dan pendokumentasian (*documenting*).<sup>137</sup> Pengamatan dapat dilakukan dengan teknik *narrative observation, anecdotal record, running record, time sampling, dan check list*.

Hasil dari pengamatan dianalisis berdasarkan pada tingkat perkembangan, kekurangan, kelebihan, dan kebutuhan anak. Penilaian anak usia dini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: catatan anekdot, check list, log reflektif atau diary, studi kasus, fortopolio. Berbagai penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian pembelajaran pendidikan inklusi dilakukan pada anak dengan mengamati dan mencatat setiap aspek perkembangan anak apakah sudah sesuai dengan tahapannya atau belum, menemukan permasalahan dilapangan serta mengevaluasinya. Penilaian ada dua macam yaitu penilaian perkembangan anak dan penilai program pembelajaran. Penilaian pembelajaran dapat di sajikan dalam bentuk laporan harian, bulanan, semesteran, dan raport.

## **E. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini**

### **1. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan pedagogi. Pendidikan anak usia dini menjadi dasar pendidikan yang menunjang kejenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan dari pendidikan informal, formal, maupun non formal.

---

<sup>137</sup> Slamet Suyanto, Op., Cit, h. 191-192.

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu lembaga yang memberikan layanan pengasuhan pendidikan dan pengembangan bagi anak dari 0-8 tahun, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah.<sup>138</sup> Pendapat Yuliani menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah sebuah lembaga pendidikan formal maupun non formal yang memberikan pelayanan pengasuhan pendidikan pada anak usia 0-8 tahun yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak. Pendidikan anak usia dini adalah periode pendidikan yang sangat menentukan perkembangan dan arah masa depan seorang anak, sebab pendidikan yang dimulai dari usia dini akan membekas dengan baik jika pada masa perkembangannya dilalui dengan suasana yang baik, harmonis, serasi, dan menyenangkan.<sup>139</sup> Pendapat lain menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan dasar sebagai penentu pendidikan anak selanjutnya.

*Early childhood education is generally defined as the education of children from birth to age eight. It include programs for infants and toddlers, nursery school, child care, and preschool programs, as well as kindergarten and primary grades.*<sup>140</sup> Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dimulai sejak lahir hingga anak berusia 8 tahun, yang meliputi penitipan dan pengasuhan anak,

---

<sup>138</sup> Yuliani Nurani Sujiono, *op. cit.*, h. 15.

<sup>139</sup> Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, *op. cit.*, h. 2.

<sup>140</sup> Bernard Spondek, Olivia N. Saracho, Michael D. Davis, *Foundations of Early Childhood Education* (USA: Prentice-Hall, Inc, 1991), p. 2.

kelompok bermain, prasekolah, taman kanak-kanak. Sedangkan Bredekamp dan Coople mengemukakan *early childhood education involves any group program serving children from birth to 8 years that is designed to promote children's intellectual, social, emotional, language, and physical development and learning.*<sup>141</sup> Menurut Bredekamp dan Coople, pendidikan anak usia dini adalah kelompok program pelayanan yang diberikan pada anak dari lahir sampai 8 tahun dengan menekankan pada aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, fisik dan motorik.

Program bagi anak usia dini memerlukan filosofi yang dapat membimbing pengajaran dan pembelajaran, didasari atas teori-teori bagaimana mengajar dan bagaimana anak belajar serta kurikulum yang dipilih untuk membimbing seluruh aktivitas dan pengalaman yang dapat diberikan kepada anak.<sup>142</sup> Program anak usia dini membutuhkan dasar untuk dapat membimbing dan memberikan pembelajaran serta kurikulum yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mengembangkan seluruh aktivitas dan pengalaman kepada anak. Para ahli sudah banyak mengungkapkan tentang pendidikan anak usia dini dari ahli barat maupun timur, termasuk Indonesia. Para ahli tersebut antara lain Pestalozzi, Froebel, Montessori, Al-Ghazali, Ibn Sina, Ki Hajar Dewantara, dsb. Perspektif

---

<sup>141</sup> Bredekamp dan Coople dalam Marjorie J. Kostelnik, Anne K. Soderman dan Alice P. Whiren, *Developmentally Appropriate Curriculum* (New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall, 2007), h. 2.

<sup>142</sup> George S. Morrison, *op. cit.*, h. 94.

pendidikan anak usia dini menurut para ahli tersebut, yaitu: (1) perspektif pengalaman dan pembelajaran; dan (2) perspektif hakikat belajar dan perkembangan.<sup>143</sup> Pendidikan anak usia dini adalah stimulasi yang diberikan pada masa yang penting dan unik yang meletakkan dasar ketika dewasa, dimana pengalaman-pengalaman belajar awal sangatlah penting untuk pengalaman proses belajar dan perkembangan selanjutnya. Dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka pendidikan anak usia dini dapat disimpulkan sebagai sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang memberikan pelayanan pendidikan, pengasuhan, dan bimbingan kepada anak sejak lahir sampai usia 8 tahun dengan mempertimbangkan aspek kognitif, bahasa, sosial, emosional, fisik, motorik serta sebagai peletak pendidikan dasar untuk pendidikan selanjutnya.

## **2. Karakteristik Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Program pada pendidikan anak usia dini harus memberikan layanan secara holistik yang meliputi pelayanan kesehatan, perkembangan, gizi, keterampilan hidup, dan berbagai stimulasi. Pelaksanaan program pendidikan anak usia dini harus saling bekerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah sehingga program dapat terlaksana dengan optimal. Prinsip pelaksanaan program pendidikan anak usia dini harus

---

<sup>143</sup> Rahmitha P. Soedjaja dalam Suyadi dan Maulidiyah Ulfah, *Konsep Dasar PAUD* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2013), h. 16.

mengacu pada prinsip umum yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak dan harus sejalan dengan proses pendidikan. Menurut Rahmitha P. Soedjaja prinsip umum yang terkandung dalam konvensi Hak Anak, antara lain: (1) nondiskriminasi; (2) dilakukan demi kebaikan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*); (3) mengakui adanya hak hidup; dan (4) penghargaan terhadap hak anak (*respect for the views of the child*).<sup>144</sup> Di dalam konvensi Hak Anak mengandung prinsip nondiskriminasi yaitu tidak membedakan anak, dilakukan untuk kebaikan anak, menghargai dan mengakui hak hidup anak, serta memberika penghargaan terhadap hak-hak anak.

Prinsip pogram pendidikan anak usia dini, antara lain: (1) berorientasi pada kebutuhan anak; (2) belajar melalui bermain; (3) lingkungan yang kondusif; (4) menggunakan pembelajaran terpadu; (5) mengembangkan berbagai kecakapan hidup; (6) menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar; dan (7) dilaksanakan secara bertahap dan berulang.<sup>145</sup> Ketujuh prinsip program pendidikan anak usia dini di atas sesuai dengan karakteristik anak yang pada dasarnya adalah bermain. Program yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan anak usia dini harus mempertimbangkan pada kebutuhan dan perkembangan anak sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Hal ini dapat dilakukan guru dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, menarik dan menyenangkan dengan

---

<sup>144</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 100.

<sup>145</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *op. cit.*, h. 71-72.

memperhatikan keamanan dan kenyamanan bagi anak; menggunakan pembelajaran terpadu melalui tema yang menarik sehingga dapat membangkitkan minat anak dan bersifat kontekstual; menggunakan media edukatif dan sumber belajar yang berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan yang sengaja disiapkan guru; dan dilaksanakan secara bertahap dan berulang, dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Selain menitik beratkan pada perkembangan dan akademik, pendidikan anak usia dini juga mengembangkan berbagai kecakapan dan keterampilan hidup melalui pembiasaan, sehingga anak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

### **3. Tujuan Pendidikan Anak usia Dini**

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tugas dan tahapan perkembangan. Pendidikan anak usia dini juga bertujuan memberikan keterampilan hidup bagi anak sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Slamet Suyanto mengemukakan pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak (*the whole child*) agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia utuh sesuai dengan falsafah suatu bangsa.<sup>146</sup> Potensi anak usia dini dapat dikembangkan melalui pendidikan anak usia dini sehingga anak dapat berkembang menjadi

---

<sup>146</sup> Slamet Suyanto, Op., Cit, h. 3.



manusia yang utuh. Tujuan pendidikan anak usia dini, antara lain: (1) memberikan pengasuhan dan bimbingan agar anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensinya; (2) mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan tindak lanjut; dan (3) menyediakan pengalaman yang beranekaragam dan menyenangkan sehingga dapat mengembangkan potensi dalam berbagai bidang.<sup>147</sup> Menurut Martuti, tujuan pendidikan anak usia dini di atas adalah memberikan pengasuhan, bimbingan, dan menyediakan pengalaman yang menyenangkan untuk mengembangkan potensi anak, serta melakukan identifikasi atau asesment sebagai dasar memberikan tindak lanjut jika terjadi penyimpangan dalam perkembangan anak.

Tujuan umum pendidikan anak usia dini yaitu untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri. Sedangkan tujuan secara khusus, antara lain: (1) anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama; (2) anak mampu mengelola keterampilan tubuh; (3) anak mampu menggunakan bahasa aktif dan pasif untuk berkomunikasi yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar; (4) anak mampu berpikir kritis dan logis; (5) anak mengenali lingkungan alam, sosial, dan budaya; serta (6) anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, dan

---

<sup>147</sup> Martuti, *Mendirikan & Mengelola PAUD (Manajemen, Administrasi & Strategi Pembelajaran)* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h. 47-48.

birama.<sup>148</sup> Tujuan khusus pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak meliputi: (1) kognitif, anak mampu berpikir kritis dan logis dalam menemukan problem solving; (2) bahasa verbal dan non verbal sebagai alat komunikasi anak; (3) fisik motorik untuk mengelola gerak tubuh; (4) sosial emosional, anak dapat beradaptasi dan mengenali lingkungan sekitar anak; (5) moral agama, anak mengenal dan percaya ciptaan Tuhan, mencintai sesama dan melakukan ibadah; serta (6) kreativitas, anak mampu memiliki kepekaan terhadap nada, irama, birama, gerak, dsb.

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak.<sup>149</sup> Salah satu tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengoptimalkan aspek perkembangan anak yaitu: aspek fisik motorik, intelektual, emosional, sosial, moral dan spiritual, bahasa, seni dan kreatifitas.<sup>150</sup> Tujuan di atas secara rinci dijelaskan, bahwa aspek fisik motorik, meliputi motorik kasar dan halus sehingga anak mampu mengontrol dan mengelola gerakan tubuh yang meliputi motorik kasar dan halus. Sedangkan aspek intelektual, yaitu anak mampu berpikir logis sehingga dapat memecahkan masalah dan memahami

---

<sup>148</sup> Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, *Acuan Menu Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini (Menu Generik)* (Jakarta: Depdiknas, 2002), h. 6.

<sup>149</sup> Suyadi dan Maulidya Ulfah, *op. cit.*, h. 17.

<sup>150</sup> Partini, *op. cit.*, h. 2-3.

sebab akibat. Pada aspek emosional, anak dapat mengembangkan konsep diri, sikap positif, kontrol diri, dan rasa memiliki yang wajar (tidak berlebihan). Aspek sosial, anak dapat bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan serta memahami keberagaman sosial dan budaya. Aspek moral dan spiritual, diharapkan anak dapat dan mampu memahami aturan moral dan nilai agama, menjalankan ritual dan terlibat dalam kegiatan keagamaan. Aspek bahasa, seni dan kreatifitas, anak dapat berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, peka terhadap irama sehingga dapat mengapresiasi seni.

#### **F. Model Evaluasi Program**

Model-model evaluasi yang digunakan mempunyai bentuk, tahap, dan penekanan pada aspek yang berbeda. Ada banyak model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program maupun pembelajaran dalam pendidikan. Kaufan dan Thomas membagi model penelitian menjadi delapan, yaitu: (1) *goal oriented evaluation models*; (2) *goal free evaluation model*; (3) *formatif sumatif evaluation model*; (4) *countenance evaluation model*; (5) *responsive evaluation model*; (6) *CSE-UCLA evaluation model*; (7) *CIPP evaluation model*; dan (8) *discrepancy evaluation model*.<sup>151</sup> Penggunaan model-model evaluasi program di atas disesuaikan dengan tujuan dan aspek program yang akan dievaluasi. Pada penelitian evaluasi program pendidikan

---

<sup>151</sup> Suharsimi Arikunto & Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 87.

inklusi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), peneliti menggunakan *countenance evaluation model*. *Countenance evaluation model* di kembangkan oleh Stake. Model evaluasi ini dikenal dengan model Stake.

Model Stake menitikberatkan pada dua hal, yaitu: *description* dan *judgement* yang masing-masing hal tersebut terdiri dari *antecedent (context)*, *transaction (process)*, dan *outcome (output)*.<sup>152</sup> Pada model Stake, suatu program pendidikan yang akan dievaluasi dibandingkan dengan program lain atau standart yang absolut.<sup>153</sup> Program atau standar yang absolut ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan penilaian pada program. Masing-masing komponen dari *antecedent (context)*, *transaction (process)*, dan *outcome (output)* dibandingkan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan antara tujuan dengan pelaksanaan di lapangan sehingga dapat menilai manfaat dan dampak program yang dilaksanakan. Penekanan pada evaluasi model *Countenance* ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi.<sup>154</sup> Ciri khas dari evaluasi model *Countenance* adalah standar kriteria penilaian dibuat oleh evaluator dan bertujuan untuk mengetahui tercapainya tujuan dan manfaat program.

Tahap evaluasi program menggunakan menggunakan model *countenance* yaitu: anteseden (*antecedents* atau *context*), transaksi

---

<sup>152</sup> Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 77.

<sup>153</sup> Eko Putro Widoyoko, *op. cit.*, h. 187.

<sup>154</sup> Farida Yusuf Tayibnaxis, *Evaluasi Program dan Insrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

(*transaction*), dan keluaran (*output/outcome*).<sup>155</sup> Model ini bertujuan untuk menilai manfaat program dengan membandingkan dengan tujuan program dan standar yang absolut. *The collection and analysis of descriptive and judgmental information and the countenance approach: identifying standarts and formulating judgment about the program's merit.*<sup>156</sup> Hasil evaluasi dianalisis dengan mendiskripsikan informasi berupa kebijakan dan identifikasi standar program. *Context* meliputi landasan dan tujuan penyelenggaraan program pendidikan inklusi, *tansaction* meliputi: proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan inklusi, serta *outcomes* seberapa manfaatnya bagi peserta didik, sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Penelitian evaluasi program pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian program. Aspek yang dievaluasi dalam penelitian ini meliputi: (1) dasar lembaga; (2) sumber daya manusia; (3) sarana prasarana; (4) pengelolaan keuangan; (5) kurikulum; (6) asesmen input dan tindak lanjut; (7) pembelajaran; (8) peran orang tua; serta (9) anak dan alumni. Penelitian evaluasi program pendidikan inklusi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menggunakan model Stake bertujuan untuk mengetahui efektifitas implementasi program pendidikan inklusi yang meliputi

---

<sup>155</sup> Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul jabar, *op. cit.*, h. 43.

<sup>156</sup> Daniel L. Stufflebeam and Chris L. S. Coryn, *Evaluation Theory, Models, & Applications* (USA: Jossey-Bass, 1976), p. 380.

aspek *context*, *process*, dan *output* sehingga dapat mengetahui manfaat dan dampak program terhadap anak dan orangtua. Model *countenance* dipilih oleh peneliti karena model *countenance* biasa digunakan dalam penelitian pendidikan, menekankan pada penilaian program pendidikan bukan hasil pendidikan. Selain itu, peneliti menggunakan model *countenance* bertujuan untuk mendeskripsikan hasil, pelaksanaan, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pendidikan inklusi sehingga dapat ditarik rekomendasi. Model *countenance* menekankan pada deskripsi dan hasil penilaian sedangkan CIPP berorientasi kepada keputusan.

### **G. Hasil Penelitian yang Relevan**

Pendidikan inklusi telah menjadi perhatian banyak orang dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan pendidikan inklusi sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian tentang pendidikan inklusi menjadi penunjang dalam implementasi pendidikan inklusi secara khusus dan perbaikan sistem pendidikan pada umumnya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Juang Sunanto tentang “Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang Terdapat ABK di Sekolah Dasar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) jumlah ABK di Sekolah Dasar bervariasi dari 1 sampai 4 anak dengan jumlah siswa antara 20-46 anak, sedangkan kelas yang memiliki ABK mempunyai guru lebih dari satu; (2) rata-rata indeks inklusi sebesar 38,58 dengan indeks ideal 54; (3) indeks inklusi yang tinggi dicapai di kelas yang memiliki guru lebih dari

satu, gurunya sering mengikuti pelatihan penanganan ABK, siswa ABK lebih banyak, dan jumlah keseluruhan siswa lebih sedikit.<sup>157</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fibriana Anjaryati pada tahun 2011 tentang “Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran BCCT di PAUD Inklusi Ahsanu Amala Yogyakarta”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendidikan inklusi pada BCCT berdampak positif terhadap siswa yang berkebutuhan khusus yaitu ABK mengalami kemajuan diseluruh aspek perkembangan dan sangat terlihat dalam kemandirian (kesiapan untuk bersosialisasi). Penyelenggaraannya mengalami hambatan dan yaitu adanya pergantian guru, tidak terdapatnya guru dari PLB (Pendidikan Luar Biasa), ABK ada yang kurang terkendali kekurangan guru, media atau alat bantu khusus untuk ABK belum lengkap, adanya ketergantungan guru pada sekolah, ABK mengikuti *mood* dalam pembelajaran, koordinasi guru blm maksimal, dan kurangnya perhatian dari dinas pendidikan. Hasil penelitian selanjutnya adalah pembelajaran dilakukan di sentra-sentra dengan berpindah-pindah dan guru melakukan proses pembelajaran dengan melakukan perencanaan dan mengevaluasinya.

Hasil penelitian yang ditulis di jurnal psikologi perkembangan dan pendidikan vol. 2 no. 1, pada bulan Februari 2013 tentang “Sikap Guru

---

<sup>157</sup> Juang Sunanto. “*Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di Kelas yang Terdapat ABK di Sekolah Dasar,*” *Jurnal Asesmen dan Tindak lanjut Anak Berkebutuhan Khusus*. <http://Jasianakku-sampel.blogspot.in/2010/04/indeks-inklusi-dalam-pembelajaran-di.html?m=1> (diakses 20 Desember 2014).

Terhadap Pendidikan Inklusi ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap”. Penelitian dilakukan oleh Syafrida Elisa dan Aryani Tri Wratari yang menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam serta observasi menghasilkan identifikasi sikap guru yang menunjukkan sikap positif, yaitu sikap menerima terhadap pendidikan inklusi dan sikap negatif yaitu sikap menolak terhadap pendidikan inklusi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap guru terhadap pendidikan inklusi, antara lain: (1) faktor guru yang terdiri dari latar belakang guru, pandangan terhadap pendidikan inklusi, tipe guru, tingkat kelas, pandangan sosio-politik, empati guru, dan gender; (2) faktor pengalaman yang terdiri pengalaman mengajar anak berkebutuhan khusus dan pengalaman kontak dengan anak berkebutuhan khusus; (3) faktor pengetahuan yang terdiri dari level pendidikan guru, pelatihan, pengetahuan, dan kebutuhan guru belajar; serta (4) faktor lingkungan pendidikan yang terdiri dari dukungan sumber daya, dukungan orang tua dan keluarga, serta sistem sekolah.

Hasil penelitian yang ditulis di “international Journal of Inclusive education” volume 9, nomor 2, April-June 2005, hal 181-192 yang berjudul “Assessing pupil development and education in an inclusive setting” oleh Siip J. Pijl dan Dorien Hamstra. Penelitian menggunakan metode evaluasi yang dilakukan di Netherland pada kelompok anak yang memiliki kebutuhan khusus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam model inklusif kesulitan



yang sering ditemui adalah penerapan evaluasi pada siswa yang berkebutuhan khusus. Asesmen yang digunakan untuk menilai anak kebutuhan khusus dari perkembangan sosial emosional, pendidikan, dan perilaku. Dari hasil asesmen ditemukan bahwa ada 1 anak yang mengalami keterlambatan bicara atau gangguan pendengaran, 2 down syndrom, 1 anak yang mempunyai kecerdasan diatas rata-rata, 1 anak keterlambatan perkembangan, dan 1 anak ADHD. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa asesmen awal sangat penting dilakukan pada anak usia dini untuk mendeteksi kebutuhan anak sejak awal sehingga akan lebih mudah untuk memberikan penanganan atau stimulasi perkembangan.

#### H. Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi menjadi standar dalam melakukan penilaian dan mengambil keputusan tentang pelaksanaan program di lapangan. Kriteria evaluasi disusun berdasarkan teori, kebijakan, dan pedoman pelaksanaan.

**Tabel 2. 1 Kriteria Standar Evaluasi Komponen Konteks**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kriteria</b>
Landasan atau Dasar	Latar belakang lembaga sesuai dengan filosofi pendidikan inklusi	Filosofi pendidikan inklusi tertuang dalam visi misi lembaga
		Filosofi pendidikan inklusi terdapat pada tujuan lembaga
		Filosofi pendidikan inklusi terdapat pada identitas lembaga (status lembaga)
		Memiliki sejarah yang berdasarkan filosofi pendidikan inklusi

	Administrasi penerimaan peserta didik	<p>Memiliki kriteria penerimaan peserta didik meliputi: ABK dan anak biasa</p> <p>Menerapkan kriteria kuota (jumlah peserta didik setiap kelas) minimal 1 ABK dan maksimal 3 ABK</p> <p>Menggabungkan ABK dan anak biasa dalam 1 kelas</p>
Sumber Daya Manusia	Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga ahli	<p>Guru memiliki kualifikasi akademi D-II PGTK, S1 PAUD, S1 Psikologi, S1 PLB/PK</p> <p>Memiliki tenaga kependidikan meliputi: 1 kepala sekolah, 1 administrasi, 1 pustakawan, dan 1 tenaga kebersihan</p> <p>Menyediakan tenaga kesehatan dan psikolog</p>
Sarana Prasarana	Lembaga memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai prinsip pendidikan inklusi	<p>Memiliki tanah dan bangunan</p> <p>Memiliki perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, dan bahan habis pakai</p> <p>Memiliki ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, kantin, tempat olahraga, tempat bermain, tempat beribadah</p> <p>Ruang kelas berukuran 3 m<sup>2</sup> setiap anak</p> <p>Memiliki minimal 1 jenis permainan <i>outdoor</i> dan <i>in door</i></p> <p>Memiliki APE yang mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, keaksaraan</p> <p>Menggunakan perlengkapan atau perabot yang mudah ditata, dipindahkan dan digunakan anak</p> <p>Penataan lingkungan berdasarkan tujuan pendidikan inklusi, bentuk perabot tidak runcing, dan warna terang</p> <p>Memiliki inventaris sarana dan prasarana</p>
Pengelolaan Keuangan	Pembiayaan program pendidikan sesuai dengan	<p>Memiliki rencana anggaran, pendapatan dan pengeluaran (pembelanjaan) program pendidikan</p> <p>Memiliki pembukuan keuangan</p>

	prinsip pendidikan inklusi	Memiliki sistem pengawasan keuangan (komite sekolah dan laporan tahunan) Pembiayaan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja
Kurikulum	Kurikulum sesuai dengan konsep pendidikan inklusi	Menggunakan prinsip kurikulum terintegrasi yaitu: 1. Menggunakan pendekatan terpadu 2. Kurikulum bersifat fleksibel dan terbuka 3. Berdasarkan pada kebutuhan anak 4. Menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berbeda sesuai tahap perkembangan anak 5. Menekankan pada perbedaan individu, agama, status sosial dan budaya Menggunakan prinsip DAP

**Tabel 2. 2 Kriteria Standar Evaluasi Komponen Proses**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kriteria</b>
Asesmen dan tindak lanjut	Asesmen <i>input</i> dilakukan sesuai dengan prinsip pendidikan inklusi	guru melakukan observasi selama 1-3 bulan untuk menilai kebutuhan, dan perkembangan awal anak Memiliki rekam medis atau hasil tes bagi anak yang berkebutuhan khusus serta informasi dari orang tua
	Tindak lanjut dari hasil asesmen <i>input</i> sesuai dengan pendidikan inklusi pada PAUD	Melakukan kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan pemerintah Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada setiap anak untuk meningkatkan perkembangan dan keterampilan anak memberikan layanan konsultasi kepada orang tua tentang tumbuh kembang anak, pemahaman ABK dan pendidikan inklusi Melakukan konsultasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli atau medis (dokter, terapis, psikolog, perawat) dalam memberikan tindak lanjut pada anak

Pembelajaran	Perencanaan pembelajaran sesuai dengan prinsip pendidikan inklusi di PAUD	Memiliki perencanaan program pembelajaran (RKH dan RPI) Rencana pembelajaran meliputi waktu, materi, media dan metode
	Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan prinsip pendidikan inklusi	Memiliki tahap pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, inti, istirahat, penutup Menggunakan media elektronik dan cetak Menggunakan sumber belajar berupa buku, lingkungan, dan narasumber Melibatkan anak secara aktif dalam pembelajaran Memberikan peran kepada anak normal untuk menjadi tutor anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran
	Penilaian pembelajaran sesuai dengan prinsip pendidikan inklusi	Penilaian pembelajaran dilakukan dari kegiatan awal, inti, istirahat dan akhir Menggunakan portofolio, chek list, catatan narasi, catatan anekdot, dalam proses penilaian Memberikan laporan hasil penilaian kepada orang tua
	Peran atau Tugas guru dalam merealisasikan pembelajaran di pendidikan inklusi	Guru melakukan perencanaan pembelajaran, penataan lingkungan, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian Guru memberikan pendampingan, perhatian, dan bimbingan kepada semua anak dalam proses kegiatan di sekolah Guru melakukan penilaian pencapaian pembelajaran dengan menulis laporan perkembangan anak

**Tabel 2. 3 Kriteria Standar Evaluasi Komponen *Outcome* atau *Input***

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kriteria</b>
Peran serta orang tua	Orang tua ikut serta dalam melaksanakan pendidikan inklusi di sekolah dan	Orang tua berperan sebagai pengawas sekolah, sponsor pada kegiatan field trip atau event tertentu, aktif dalam kegiatan proyek, serta berpartisipasi pada kegiatan akhir
		Orang tua menjadi volunter atau relawan di kelas, terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, membantu kegiatan di kelas, serta menjadi pembimbing dan pendamping anak di rumah
		Orang tua menjadi guru tamu dan berbagi pengetahuan tentang topik budaya, hobi, dsb. dengan kegiatan yang menyenangkan,
	Orang tua mendapatkan manfaat dan mampu melaksanakan konsep pendidikan inklusi	Orang tua menerima, memberikan kesempatan, memberikan penghargaan (apresiasi) tentang pencapaian anak berkebutuhan khusus
		Orang tua mengetahui cara membimbing dan berinteraksi terhadap kegiatan anak serta dapat mengidentifikasi kebutuhan dan perkembangan anak
Anak dan Alumni	Anak dan alumni dapat mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan inklusi dalam kehidupan sehari-hari	Anak memiliki kesempatan untuk berinteraksi baik dengan orang lain maupun dengan lingkungan
		Anak memiliki keterampilan sosial Anak mengenal dan menghargai keberagaman atau perbedaan